



LAPORAN KINERJA

**Sekretariat Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Tahun Anggaran 2023

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja disusun sesuai amanat: i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; ii) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; iii) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; iv) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan v) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

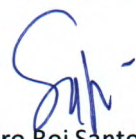
Laporan ini memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan serta menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai mengenai pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Laporan Kinerja dapat berperan sebagai alat penilaian kinerja dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu laporan kinerja merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak karena keberhasilan yang diraih atas berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban kinerja, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi sarana untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Jakarta, 9 Januari 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan



Sudiro Roi Santoso

NIP. 196904162001121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
EXECUTIVE SUMMARY	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Isu Strategis.....	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Uraian Singkat Rencana Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja	6
C. Target Kinerja	11
D. Metode Pengukuran	14
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	16
A. Sumber Daya Manusia	16
B. Sarana dan Prasarana.....	19
C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	22
D. Analisis Sumber Daya dan Anggaran.....	23
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	24
B. Capaian Kinerja.....	25
C. Perbandingan Kinerja	28
D. Realisasi Anggaran.....	34
E. Analisis Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	36
F. Capaian dan Prestasi Lain.....	43
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Faktor Pendukung Keberhasilan	52
C. Permasalahan.....	53
D. Rekomendasi.....	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023	7
Tabel 2.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2023 menurut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020-2024	11
Tabel 3.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	18
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.....	18
Tabel 3.3 Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan Fungsional tertentu	19
Tabel 3.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana	20
Tabel 4.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP	24
Tabel 4.2 Capaian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja	25
Tabel 4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	28
Tabel 4.4 Perbandingan Capaian Output Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah ...	29
Tabel 4.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah...	33
Tabel 4.6 % Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022	34
Tabel 4.7 Produk Hukum	37
Tabel 4.8 Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) Ke PPID.....	39
Tabel 4.9 Tema yang diusulkan pada Reformasi Birokrasi.....	41
Tabel 4.10 Pernyataan Risiko yang Menjadi Prioritas.....	46
Tabel 4.11 Nilai Pengadaan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Persetujuan Jabatan	47
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023	50
Tabel 5.2 Realisasi Keuangan	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023	3
Gambar 2.1 Struktur Program Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023	5
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023.....	8
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1 Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023.....	9
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1 Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023.....	10
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023	16
Gambar 3.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Gambar 3.3 Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	17
Gambar 3.4 Rekapitulasi Pegawai PNS Berdasarkan Golongan	18
Gambar 3.5 Dokumentasi Sarana dan Prasarana	21
Gambar 3.6 Kronologis Revisi DIPA dan Anggaran	22
Gambar 4.1 Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Rencana Keuangan	35
Gambar 4.2 Perbandingan Realisasi Fisik dengan Rencana Fisik	35
Gambar 4.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 hingga Tahun 2023	36
Gambar 4.4 Dokumentasi Penandatanganan Pakta Integritas	40
Gambar 4.5 Nilai IKPA Tahun 2023	49
Gambar 5.1 Kurva S Tahun Anggaran 2023.....	52



EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama 1 tahun atas target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dinilai dari 6 indikator kinerja dengan rencana total output yang dihasilkan sebanyak 36 laporan/layanan/dokumen. Pada tahun 2023, terdapat perubahan target Sasaran Program mengikuti dengan perubahan yang terjadi pada Sekretariat Jenderal karena Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung capaian target dari Sekretariat Jenderal. Target Sasaran Program ini berubah menjadi 87,81 (semula 79,76) dan diakomodir didalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Revisi Ke-1 yang terbit di Bulan Agustus dan Revisi ke-2 yang terbit pada Bulan Desember. Akibat dari perubahan target ini, target antara Rencana Strategis dengan Perjanjian Kinerja terdapat perbedaan. Adapun capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel Capaian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Renstra 2023 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	79,26	87,81	99,37
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	16,13
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	15,00
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	18,75
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	10,00	10,00	10,00

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2023 sebesar 99,37. Terdapat 3 IKK dengan capaian yang melebihi dari target Rencana Strategis maupun

Perjanjian Kinerja. Selain capaian kinerja, realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2023 sebesar 98,79% atau senilai Rp67.500.644.000,00 dari

total pagu sebesar Rp68.327.041.000,00. Total anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami 2 kali perubahan pada

Revisi DIPA ke-6 dan Revisi DIPA ke-7. Adapun Tabel realisasi keuangan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

(Status iemonitoring PUPR tanggal 5 Januari 2024)

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Pagu	Realisasi	Keu (%)		Fisik (%)	
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL
1	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	68.327.041	67.500.644	100,00	98,79	100,00	100,0
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	61.801.995	61.108.217	100,00	98,88	100,00	100,0
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.842.198	2.801.089	100,00	98,55	100,00	100,0
4	Layanan Manajemen SDM Internal	1.015.000	984.480	100,00	96,99	100,00	100,0
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.667.848	2.606.857	100,00	97,71	100,00	100,0

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menghadapi beberapa isu dan kendala. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja dan realisasi adalah :

1. Terdapat 7 kegiatan baru yang mendukung penambahan penilaian untuk capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Diantara 7 paket kegiatan baru tersebut, terdapat 2 kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022, yaitu:

- Penyusunan Laporan Manajemen Risiko; dan
- Pembiayaan Infrastruktur Kreatif *Creative Infrastructure Financing CreatIFF* Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan;

2. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik telah melakukan pendampingan penyusunan produk hukum selama tahun 2023 dan yang telah ditetapkan/diundangkan sebanyak 12 buah peraturan. Selain itu, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga menetapkan 31 usulan perjanjian dan 8 usulan pertimbangan hukum selama tahun 2023;

3. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik juga telah melaksanakan penerimaan dan penindaklanjutan terhadap pengaduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui e-mail, media sosial dan SPAN Lapor sebanyak 229 aduan dimana sebanyak 185 aduan telah selesai (tuntas) dan 44 aduan masih dalam proses (berlanjut);

4. Peningkatan jumlah pengikut pada akun media sosial Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dibarengi dengan peningkatan jumlah feed dan post secara berkala;

5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mengusulkan permasalahan dalam Road Map RB General dan RB Tematik terkait tema Investasi dan Inflasi;

6. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2023 adalah 89,96 dimana lebih baik dibandingkan dengan nilai IKPA pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 89,09;

7. Peningkatan pelayanan kepegawaian salah satunya dengan ditetapkannya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai pembina pada

Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan

8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dengan adanya beberapa isu dan kendala di tahun 2023, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan dan terus meningkatkan fungsi pelayanan terhadap seluruh unsur di Direktorat Jenderal dengan baik;
2. Menerapkan budaya dialog kinerja antara pimpinan dan staf/pegawai sebagai wujud komunikasi dan komitmen terhadap pengelolaan kinerja dan kegiatan guna mencapai output sesuai dengan rencana;
3. Koordinasi dengan satuan kerja, unit kerja, unit organisasi dan/atau kementerian/Lembaga lainnya dalam memaksimalkan pencapaian kinerja;
4. Review dan revisi dokumen perencanaan (Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja) sesuai dengan perubahan dan dinamika selama tahun berjalan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
5. Memaksimalkan penyelesaian dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
6. Merencanakan pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya sebaik mungkin dengan mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun berjalan/sebelumnya;
7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk meminimalisir adanya revisi selama pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan;
8. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
9. Menyelesaikan lelang pelaksanaan renovasi sebelum triwulan 1 berakhir sehingga pelaksanaan renovasi dapat selesai sebelum triwulan IV;
10. Pelaksanaan renovasi tidak dilakukan di triwulan 4 (3 bulan terakhir/mendekati akhir tahun anggaran) untuk menghindari gagal lelang ataupun pembayaran tertunda serta menghindari nilai rendahnya nilai IKPA di akhir tahun;
11. Segera menyusun penyesuaian dengan adanya kenaikan Gaji PNS dan penambahan Pegawai PPPK;
12. Menyiapkan mitigasi untuk menghindari terjadinya kembali temuan BPK yang terkait dengan administrasi Perjalanan Dinas dan *Loan*;
13. Lebih memperhatikan dan memonitoring pengajuan penambahan kegiatan maupun anggaran agar tidak mengakibatkan banyaknya revisi anggaran sepanjang tahun;
14. Meningkatkan kesadaran pegawai dalam penyusunan dan penilaian kinerja pegawai tepat waktu melalui sosialisasi dan pemberitahuan rutin dengan surat;
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi terkait edukasi Pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui media sosial dan media publikasi elektronik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengamanatkan bahwa kementerian/ Lembaga bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja melalui pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan capaian pada Laporan Kinerja. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja sebagai amanat dalam perundang-undangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja Tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta tugas dan fungsi sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat terhadap jumlah anggaran yang dimanfaatkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan penyampaian gambaran permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi masukan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan maupun Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

B. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki tugas berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 528 berupa:

“Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melakukan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;

- e. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional.
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal;
- i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- j. pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- k. pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

C. Struktur Organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan dibantu oleh tiga Kepala Bagian yang saling mendukung dalam melaksanakan amanat tugas dan fungsi organisasi. Adapun struktur organisasi beserta tugas dan fungsi pada setiap bagian sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;

Tugas : melaksanakan penyusunan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran; penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi; pelaksanaan pemantauan, evaluasi; dan

pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara; serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal.

2. Bagian Kepegawaian dan Umum;

Tugas : melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai; fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai; penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi; pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional; pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan; penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana direktorat jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

3. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Tugas : melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama Pembiayaan; pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Susunan organisasi pada setiap bagian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023



D. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2023, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi kendala maupun capaian lebih dalam kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di tahun 2023. Adapun

1. Perubahan target capaian kinerja dan metode perhitungan pada Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi di Bulan Desember 2023;
2. Koordinasi Nilai IKPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Pelaksanaan pengembangan pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pemberian kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan;
4. Koordinasi penyusunan dan pengelolaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

5. Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial sebagai salah satu bentuk informasi sekaligus koordinasi dan pengelolaan pengaduan publik;
6. Pembinaan dan Pengelolaan pada Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Rendahnya ketepatan waktu penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. Pelaksanaan renovasi ruang kerja Direktorat dan Gedung A2 untuk memfasilitasi Pegawai ; dan
9. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan BPK Tahun 2023.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, isu strategis dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan secara singkat terkait Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, target kinerja tahun yang dilaporkan dalam Rencana Strategis.

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Bab ini menjelaskan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Analisis sumber daya manusia dan anggaran.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab IV, dijelaskan terkait capaian kinerja tahun anggaran 2023, perbandingan kinerja (yang terdiri dari perbandingan realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah, dan perbandingan realisasi capaian kinerja dengan standar nasional (benchmarking)), realisasi anggaran, analisis pemanfaatan laporan kinerja, dan penghargaan atas kinerja.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan terkait simpulan umum, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Uraian Singkat Rencana Strategis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan lima tujuan dan lima sasaran strategis Kementerian dalam 2020-2024. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS-3) yaitu Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau dan (SS-5) yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

1. Tujuan

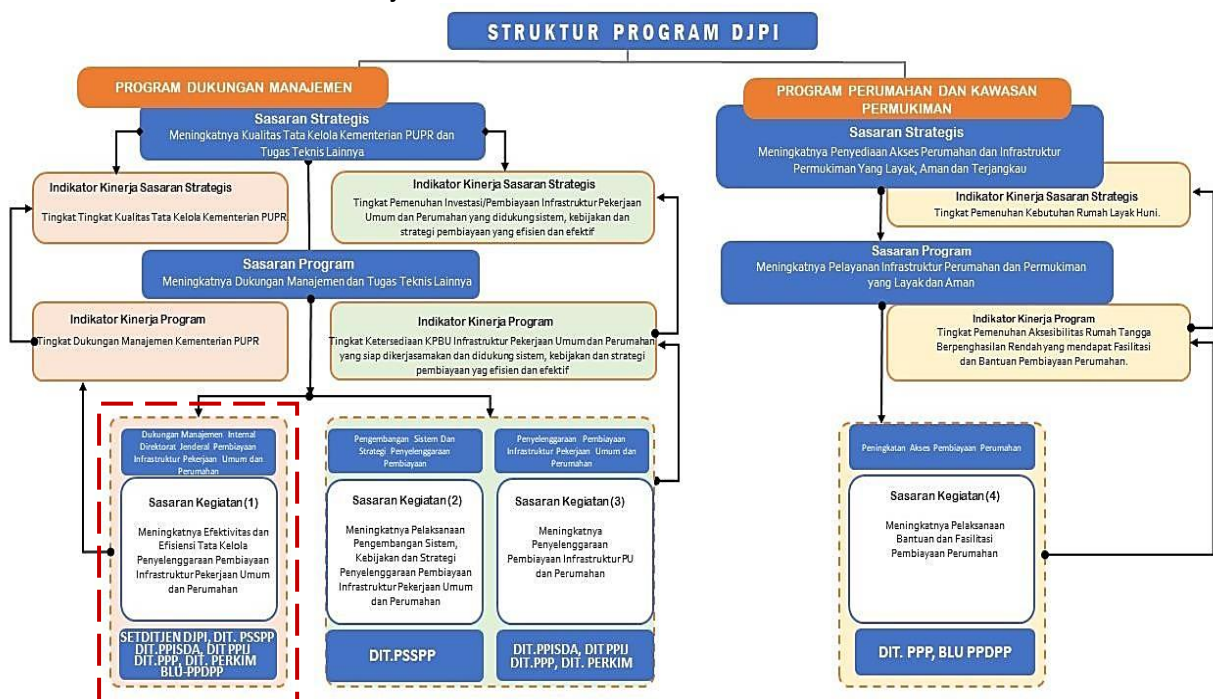
Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung tujuan Kementerian PUPR khususnya pada Peningkatan

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi.

2. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung Sasaran Strategis (SS-5) Kementerian PUPR dengan indikator kinerja “Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR”. Sasaran Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan Sasaran Strategis tersebut adalah “Program Dukungan Manajemen” dengan indikator kinerja Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Adapun struktur program DJPI dijelaskan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023



3. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berupa:

- Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan, ketatausahaan dan keprotokolan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan Pembiayaan perumahan melalui:
 - Penataan regulasi dan kebijakan;
 - Pelayanan bantuan hukum;
 - Peningkatan dukungan, tata laksana dan koordinasi kelembagaan;
 - Peningkatan pengelolaan anggaran;
 - Peningkatan kapasitas SDM serta pemberdayaan pemangku kepentingan; dan
 - Pengembangan pengelolaan asset (*property management*).

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, untuk menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki strategi “Mengimplementasikan reformasi birokrasi perencanaan dan penganggaran serta reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan umum dan Perumahan”.

B. Perjanjian Kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berdasarkan pada Surat Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan Nomor 26/ND/Ps.1/2020 tanggal 14 Mei 2020

perihal Notulensi Rapat Pembahasan Keselarasan Renstra Setditjen PI 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Setditjen PI TA. 2020 yang menetapkan penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dikarenakan adanya ketidaksinkronan pada Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum pada Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Target kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk Tahun 2023 mengalami perubahan (revisi) dari yang tercantum pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 yang awalnya sebesar 79,26 menjadi 87,81 sesuai dengan adanya revisi perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang terbit pada Oktober 2023. Selain adanya perubahan target secara total, perubahan target kinerja juga terjadi pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”.

Perubahan bobot target pada setiap IKK ini didasari pada deviasi bobot IKK secara total pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan” pasca likuidasi BLU PPDPP di tahun 2022. Adapun target capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Target Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	Baseline 2022 (%)	Target 2023 Awal (%)	Target 2023 Revisi (%)
1	2		3
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	71,54	79,26	87,81
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	15,00
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00	10,00

Selama Tahun Anggaran 2023, telah terjadi perubahan Perjanjian Kinerja sebanyak 1 kali dengan rincian berikut:

- 1. Perjanjian Kinerja Awal**, terbit pada Bulan Januari 2023 yang disusun berdasarkan DIPA Revisi ke-1 yang terbit pada tanggal 28 Desember 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp73.945.585.000,00 (Tujuh puluh tiga milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Adapun Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Gambar 2.2.
- 2. Revisi ke-1**, terbit pada Bulan Oktober 2023 yang disusun berdasarkan DIPA Revisi ke-6. Pagu anggaran pada Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 ini sebesar Rp67.945.585.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu). Adapun Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Gambar 2.3.

- 3. Revisi ke-2**, terbit pada Bulan Desember 2023 yang disusun berdasarkan DIPA Revisi ke-7. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan akhir adalah Rp68.327.041.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh empat puluh satu ribu rupiah). Adapun Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.2
Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
Jabatan : **Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

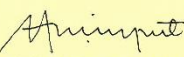
Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama



SUDIRO ROI SANTOSO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	79,26%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%

KEGIATAN

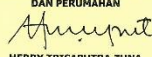
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp73.945.585.000,00

JAKARTA, JANUARI 2023

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



SUDIRO ROI SANTOSO

Gambar 2.3
Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
 Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

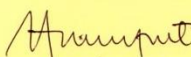
Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2023

Pihak Kedua



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama



SUDIRO ROI SANTOSO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	87,81%
SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
EBA.956 Layanan Barang Milik Negara	1 Layanan
EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan
EBB.951 Layanan Sarana Internal	2 Unit
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2 Unit
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
EBA.957 Layanan Hukum	1 Layanan
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260 Orang
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 Dokumen
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan

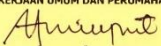
KEGIATAN

Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp67.945.585.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

JAKARTA, OKTOBER 2023

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



SUDIRO ROI SANTOSO

Gambar 2.4
Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**
 Jabatan : **Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

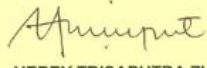
Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
 Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama



SUDIRO ROI SANTOSO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	87,81%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
EBA.956 Layanan Barang Milik Negara	1 Layanan
EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan
EBB.951 Layanan Sarana Internal	2 Unit
EBB.971 Layanan Prasana Internal	2 Unit
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
EBA.957 Layanan Hukum	1 Layanan
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
EBK.954 Layanan Manajemen SUM	260 Orang
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
EBD.952 Perencanaan dan Penganggaran	3 Dokumen
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan

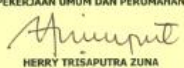
KEGIATAN

Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp68.327.041.000,00

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



SUDIRO ROI SANTOSO

C. Target Kinerja

1. Target Kinerja berdasarkan Rencana Strategis

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024, target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 79,26 dengan enam (6) indikator kinerja kegiatan. Selain target kinerja, output kegiatan pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan” terdiri dari 26 kegiatan yaitu:

- Reformasi Birokrasi Unit Eselon I;
- Manajemen Transformasi Organisasi;
- Pengelolaan Pegawai ;
- Tata Kelola TNDE;
- Kerumah-tangga;
- Advokasi Hukum;
- MOU dengan APH dan Instansi lain terkait;
- Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I;

- Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I;
- Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI;
- Strategi Komunikasi;
- Publikasi;
- Laporan Keuangan Unit Eselon I;
- Laporan Keuangan Unit Eselon II;
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI;
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI;
- Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan;
- Gaji dan Tunjangan;
- Operasionalisasi Kantor DJPI; dan
- Operasionalisasi Kantor pada 5 Direktorat di Lingkungan DJPI.

Total anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan DIPA Awal yang terbit pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp73.945.585.000,00 (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Adapun rincian pendanaan pada setiap kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2023 menurut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA		ANGGARAN (Juta Rupiah)	
			AWAL	REVISI	AWAL	REVISI
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN						
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN						
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	100	123.798	73.397
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :						
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, danPengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15	15	67.156	60.744
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum PembiayaanInfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15	15	1.450	1.117
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta	%	10	15	1.400	1.815

PROGRAM / KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA		ANGGARAN (Juta Rupiah)	
				AWAL	REVISI	AWAL	REVISI
	Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran PembiayaanInfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	10	15	1.220	1.210
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran PembiayaanInfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	15	15	1.370	1.458
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern,terpadu dan berorientasi publik		%	10	15	1.350	1.983
KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan							
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan						75.938	78.946
OUTPUT KEGIATAN :							
1	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I		Layanan	1	1	338	350
	1	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	338	350
2	Manajemen Transformasi Organisasi		Layanan	2	1	1.351	450
	1	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	2	1	1.351	450
3	Pengelolaan Pegawai		Orang	260	260	1.689	600
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	3	2	1.689	600
4	Tata Kelola TNDE dan Arsip		Layanan	1	1	563	300
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan	1	1	563	300
5	Kerumahtanggaan		Layanan	2	2	1.126	600
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan	2	2	1.126	600
6	Advokasi Hukum		Layanan	2	1	901	350
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	2	1	901	350
7	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait		Layanan	1	1	450	350
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan	1	1	450	350
8	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		Layanan	3	2	1.689	750
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	2	1.689	750
9	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		Layanan	1	1	1.002	620
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	1	1.002	620
10	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		Layanan	2	2	1.536	750

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA		ANGGARAN (Juta Rupiah)	
				AWAL	REVISI	AWAL	REVISI
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan	2	2	1.536	750
11	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		Layanan	1	1	627	600
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan	1	1	627	600
12	Strategi Komunikasi		Layanan	2	1	1.463	450
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	Laporan	2	1	1.463	450
13	Publikasi		Layanan	2	2	1.126	900
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan	2	2	1.126	900
14	Laporan Keuangan Unit Eselon I		Laporan	1	2	1.013	500
	1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	2	1.013	500
15	Laporan Kinerja Unit Eselon II		Laporan	1	1	338	150
	1	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	1	338	150
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI		Laporan	1	2	1.126	870
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	1	2	1.126	870
17	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI		Unit	1	1	563	200
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	563	200
18	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI		Unit	1	1	563	350
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1	563	350
19	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan		Unit	1	1	462	2.024
	1	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	462	2.024
20	Gaji dan Tunjangan DJPI		Layanan	1	1	29.597	39.621
	1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	29.597	39.621
21	Operasionalisasi Kantor DJPI		Layanan	1	1	23.417	28.460
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	23.417	28.460
22	Operasionalisasi Kantor Direktorat		Layanan	1	1	5.000	5.000
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	Layanan	1	1	1.000	1.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA		ANGGARAN (Juta Rupiah)	
			AWAL	REVISI	AWAL	REVISI
2	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	Layanan	1	1	1.000	1.000
3	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	Layanan	1	1	1.000	1.000
4	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	Layanan	1	1	1.000	1.000
5	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	Layanan	1	1	1.000	1.000

2. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Target kinerja berdasarkan perjanjian kinerja sesuai dengan PK revisi ke-2 yang terbit pada Desember 2023 pada Gambar 2.4. Target output berdasarkan Gambar 2.4 pada setiap IKK sebagai berikut :

- IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari :
 - 1 layanan Barang Milik Negara;
 - 1 layanan umum;
 - 1 layanan perkantoran;
 - 2 unit sarana internal; dan
 - 2 unit prasarana internal.
- IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari :
 - 1 layanan hukum; dan
 - 1 layanan bantuan hukum.
- IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari :
 - 1 Layanan organisasi dan tata kelola internal; dan
 - 260 orang terlayani manajemen SDM.

- IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari :

- 3 dokumen pemantauan dan evaluasi; dan
- 2 dokumen manajemen keuangan.

- IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari 3 dokumen perencanaan anggaran;
- IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik terdiri dari 1 layanan hubungan masyarakat.

D. Metode Pengukuran

Pengukuran merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Metode pengukuran berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024. Terdapat enam (6) Indikator Kinerja dalam menilai capaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan” yaitu:

1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
6. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik.

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Sumber Daya Manusia

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatur terkait struktur organisasi beserta tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Guna mendukung pencapaian tugas dan fungsi tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang cakap dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang kemudian dibantu oleh 3 kepala bagian yang membidangi (1) perencanaan, program dan keuangan, (2) kepegawaian dan umum, dan (3) hukum dan komunikasi publik. Adapun struktur organisasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut:



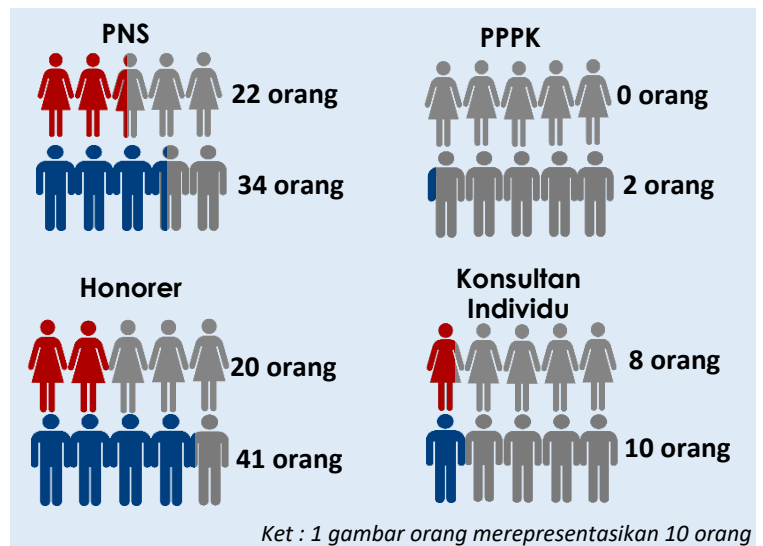
Gambar 3.1
Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki sumber daya manusia total sebanyak 126 orang termasuk didalamnya Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun pegawai yang terdapat di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditampilkan pada Gambar 3.2. Rincian pegawai (Lampiran 1) pada setiap bagian sebagai berikut:

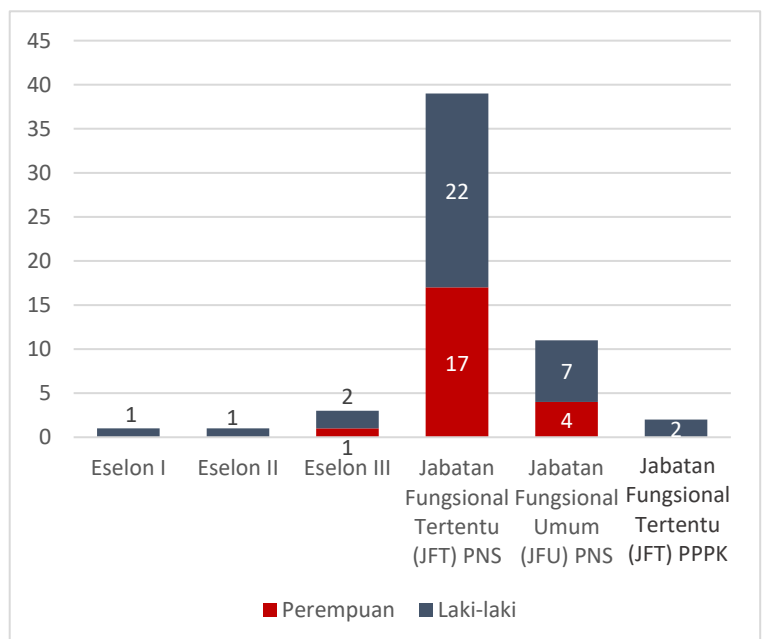
1. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebanyak 1 orang;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebanyak 1 orang;
3. Tim Bidang Reformasi Birokrasi sebanyak 2 orang;
4. Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan sebanyak 45 orang;
5. Bagian Kepegawaian dan Umum sebanyak 55 orang; dan
6. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik sebanyak 22 orang.

Berdasarkan gambar 3.2, total pegawai PNS sebanyak 56 orang, PPPK sebanyak 2 orang yang baru masuk di tahun 2023, honorer (PPNPN) sebanyak 61 orang dan Konsultan Individu sebanyak 18 orang. Berdasarkan data kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, masih terdapat kebutuhan sebanyak 88 pegawai ASN yang belum dapat dipenuhi oleh jumlah pegawai saat ini. Adanya gap antara kebutuhan dan kondisi pegawai saat ini, dilakukan pemenuhan melalui pengadaan Konsultan Individu.

Pegawai PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari Golongan I, II, III, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum. Jumlah pegawai berdasarkan pada jabatan ditampilkan pada Gambar 3.3.

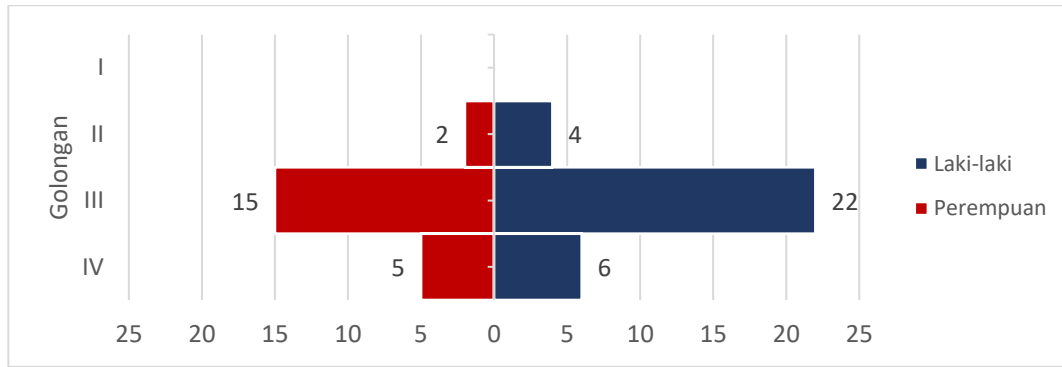


Gambar 3.2
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.3
Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Berdasarkan pada gambar 3.3, 2 orang PPPK sudah berstatus Jabatan Fungsional Tertentu. Secara total terdapat 14 jenis Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan rincian pada Tabel 3.2.



Gambar 3.4

Gambar 3.4 menggambarkan mayoritas pegawai PNS di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan golongan III sebanyak 37 orang, kemudian terdapat 11 orang golongan IV dan 6 orang golongan II. Tidak terdapat pegawai PNS dengan golongan I.

Kualitas sebuah organisasi dapat dipengaruhi dari kualitas pegawainya. Berdasarkan tabel 3.1 dibawah, sebanyak 10 orang pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan hanya ada 1 pegawai yang lulusah S3 yaitu Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Secara mayoritas, pegawai dengan Pendidikan S1 masih yang paling mendominasi.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS		PPPK		Honoror		TPI		Total
	P	L	P	L	P	L	P	L	
S3	-	1	-	-	-	-	-	-	1
S2	10	11	-	-	-	2	1	1	25
S1	10	14	-	1	4	9	7	7	52
Diploma	2	3	-	1	1	3	-	-	10
SMA	-	4	-	-	4	20	-	-	28
SMP	-	-	-	-	1	7	-	2	10
TOTAL	22	33	0	2	10	41	8	10	126

Kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai terus dilaksanakan baik dari internal maupun eksternal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengembangan kompetensi ini dapat berupa peningkatan kapasitas organisasi secara keseluruhan maupun per individu. Pada tahun 2023, terdapat 2 pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang mendapat kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan dengan karyasiswa. Selain karyasiswa, sebanyak 3 orang pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ke luar negeri. Sehingga terdapat 28 pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial dan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR maupun selain Kementerian PUPR. Adapun pegawai yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Jenis Pelatihan/ Pendidikan	Orang
Pelatihan Kepemimpinan	1
Pelatihan Bidang PUPR	5
Pelatihan Manajemen	15
Pelatihan Jabatan Fungsional	5
Karyasiswa	2
TOTAL	28

Pengembangan pegawai tidak hanya diberikan pada PNS saja, namun juga diberikan kepada honoror dan TPI (Konsultasi Individu). Pengembangan yang diberikan kepada seluruh pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan sejumlah 65 orang berupa persiapan menghadapi ujian penerimaan PNS/PPPK yang dilaksanakan pada Bulan November 2023. Berdasarkan Permen PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional,

ASN Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari Jabatan Fungsional yang ditampilkan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan Fungsional tertentu

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Jumlah
1	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1	-	-	-	-	-	1
2	Analisis Anggaran	-	3	-	-	-	-	3
3	Analisis Hukum	-	2	-	-	-	-	2
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	-	-	5	-	-	-	5
5	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	7	-	-	-	-	8
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	-	3	-	-	-	-	3
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	1	4	-	-	-	-	5
8	Arsiparis	-	3	-	-	-	-	3
9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	1	-	-	-	-	1
10	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	-	1	-	-	-	-	1
11	Perencana	-	-	2	-	-	-	2
12	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	-	3	-	-	-	1	4
13	Pranata Keuangan APBN	-	-	-	-	-	1	1
14	Pranata Komputer	-	-	2	-	-	-	2
Jumlah		3	27	9	0	0	2	41

Berdasarkan tabel 3.3, jabatan fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan yang paling besar jumlahnya dengan jumlah 8 orang di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan belum terdapat jabatan fungsional tertentu tingkat penyelia dan mahir. Sesuai dengan data kebutuhan pegawai, kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Ahli Pertama dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama memiliki kekurangan yang paling besar yaitu sejumlah 6 orang pada masing-masing jabatan fungsional. Selain dari kedua jabatan fungsional tersebut, juga terdapat kebutuhan pegawai untuk beberapa jabatan fungsional lainnya.

Pada tahun 2023, terdapat 2 pegawai yang sedang melakukan karyasiswa (sekolah) yaitu:

- Mifta Fadya S.Tr.Kom., Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
- Arif Harsa Pradipta S.Kom., Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Selain karyasiswa, terdapat 2 pegawai yang sedang ditugaskan di BP Tapera. Adapun kedua pegawai tersebut adalah :

- Siska Purnianti, S.H., M.Hum selama 5 tahun sejak 1 April 2022, dan
- Aisah Dewi Setiawaty, S.T., M.Si selama 2 tahun sejak 1 Juli 2022.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai alat pendukung untuk mencapai output dan outcome organisasi. Sekretariat Direktorat

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menempati ruangan kerja yang terletak di Gedung A Lantai 2 Wing 1, Wing 2 dan Wing 3 serta Gedung B Lantai 1,

Lantai 2, dan Lantai 4. Adapun rekap sarana dan prasarana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditampilkan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

No	Nama BMN	Total
1	PC	116
2	Acces Poin	2
3	Auto Switch/Data Switch	1
4	Lap Top	11
5	Monitor	3
6	Note Book	48
7	Printer	86
8	Rack Server	1
9	Router	2
10	Scanner	18
11	Server	0
12	Switch	1
13	Tablet PC	11
14	Wireless Acces Poin	3
15	Alat Angkutan Darat Bermotor (KDO)	2
16	AC Sentral	21
17	AC Split	36
18	Acces Control system	5
19	Air Cleaner	11
20	Alat Dapur Lainnya	1
21	Alat Penghancur Kertas	9
22	Camera Adaftor	0
23	Camera Conference	7
24	Camera Digital	8
25	Camera Video	3
26	CCTV	5
27	Cubikal	129
28	Dispenser	4
29	Drone	5
30	Elektrik Termometer	5
31	Exhauxe Fan	3
32	Filing Cabinet Besi	24
33	Finger Printer and attadance	1
34	Focusing Screen Layar	7
35	Handy Came	1
36	Handy Talky	16
37	Alat Rumah Tangga Lainnya	2
38	Kaca Hias	1
39	Kipas Angin	2
40	Kitchen set	3
41	Kursi Besi Metal	160
42	Kursi Fiber Glas	315

No	Nama BMN	Total
43	Kursi Kayu	26
44	Lampu Blit Kamera	1
45	LCD Projector	8
46	Lemari Besi Metal	59
47	Lemari Display	2
48	Lemari es	7
49	Lemari Kayu	18
50	Lemari Penyimpan	1
51	Lensa Kamera	6
52	Locker	4
53	Meja Kerja Kayu	166
54	Meja Komputer	1
55	Meja Makan Besi	1
56	Meja Makan Kayu	12
57	Meja Marmer	2
58	Meja Rapat	42
59	Meja Resepsionis	17
60	Mesin Barcode	16
61	Mesin Cuci	1
62	Mesin Jilid	2
63	Mic Conference	1
64	Nakas	28
65	Oven Listrik	2
66	Peralatan Fitnes	5
67	Pintu Elektrik yg Memakai Akses	25
68	Portable Air Pendingin	2
69	Rak Besi	147
70	Rak Kayu	2
71	Sofa	23
72	Softboard	1
73	Sound system	1
74	Telephone PABX	1
75	Televisi	23
76	Tripod Camera	2
77	Unit Power Suplay	1
78	Video Conference	0
79	Voice Recoder	2
80	White Board	2
81	White Board Elektronik	1
82	Wireless	1
83	Stationary Generating Set	1
84	Pompa Air	1

Berdasarkan tabel 3.3, total sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 1.753 unit. Untuk detail dari sarana dan prasarana terlampir pada Lampiran 3 Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023. Adapun beberapa dokumentasi sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut.

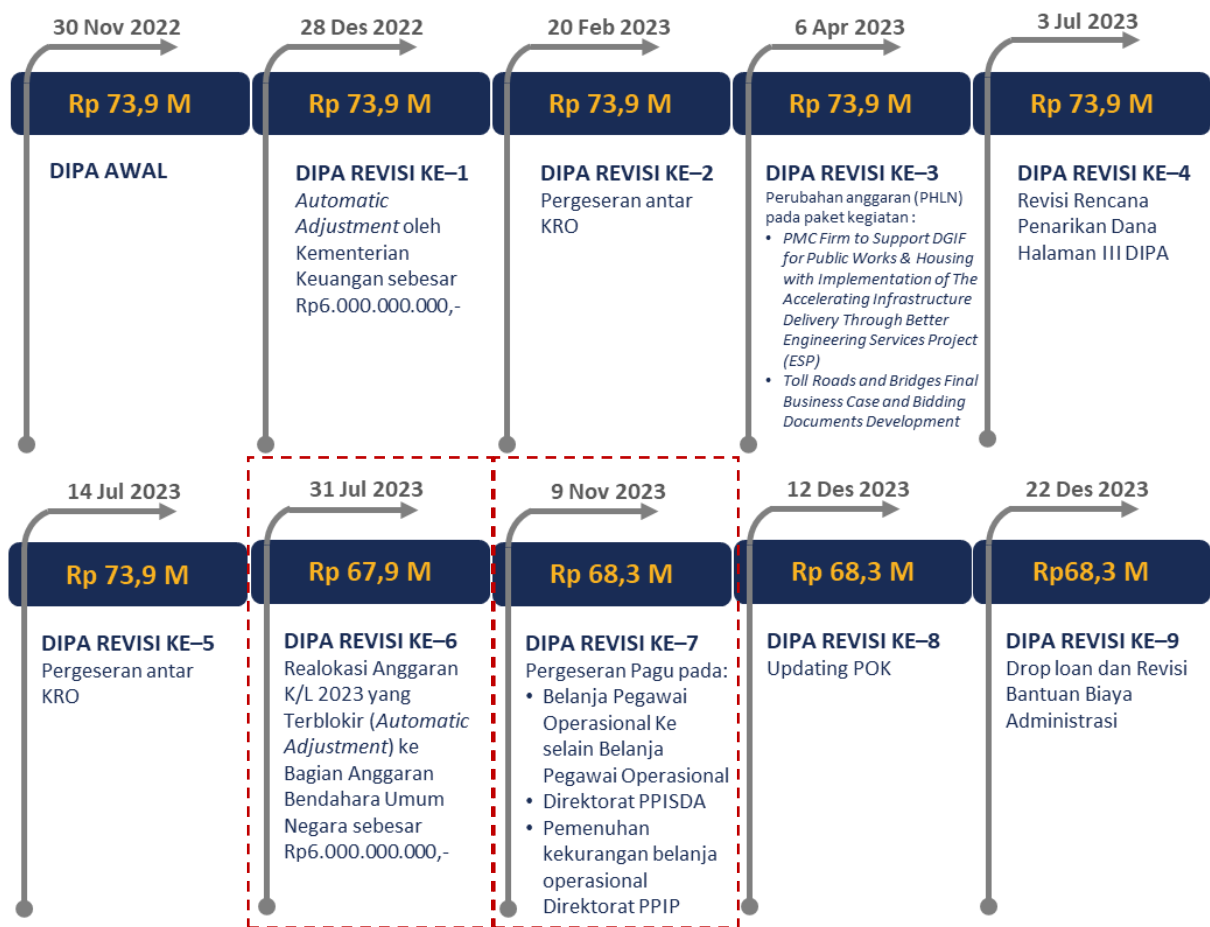


Gambar 3.5
Dokumentasi Sarana dan Prasarana

C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah melakukan 9 kali Revisi DIPA. Untuk pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah mengalami perubahan pagu sebanyak 2 kali. Adapun pagu awal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp73.945.585.000,00 (tujuh puluh tiga milyar

sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pagu terakhir Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp68.327.041.000,00 (enam puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah). Adapun kronologis Revisi DIPA di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditampilkan dalam Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.6
Kronologis Revisi DIPA dan Anggaran

Mengacu pada gambar 3.3, perubahan pagu pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terjadi pada DIPA Revisi ke-6 dan DIPA Revisi Ke-7. Adapun rincian perubahan pagu sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-6, terbit pada tanggal 31 Juli 2023. Revisi dilakukan untuk mengakomodir

pengembalian anggaran belanja pegawai yang terblokir untuk *Automatic Adjustment* senilai Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Akibat adanya pengembalian anggaran tersebut, pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami perubahan menjadi Rp67.945.585.000,00; dan

2. Revisi DIPA ke-7, terbit pada tanggal 9 November 2023. Revisi dilakukan untuk mengakomodir pergeseran anggaran dari belanja pegawai operasional ke selain belanja pegawai operasional sebesar Rp920.000.000,00 dan penambahan serta pergeseran pagu antar KRO. Perubahan ini menyebabkan berkurangnya pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menjadi Rp68.327.041.000,00. Pada revisi ini juga

Rincian dari perubahan DIPA pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat pada Lampiran 6.

D. Analisis Sumber Daya dengan Anggaran

Sumber daya yang terdapat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia, namun keberadaan sarana/prasarana juga menjadi sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran pada Tahun Anggaran 2023, terdapat sebesar Rp32.701.169.000,00 untuk belanja pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Total belanja pegawai tersebut untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebanyak 206 pegawai PNS. Selain itu, terdapat pula pembayaran gaji dan tunjangan untuk 37 orang pegawai PPPK di tahun 2023. Pembayaran gaji dan tunjangan kepada seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan bentuk pelayanan dan pelaksanaan dari Tugas dan Fungsi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Selain anggaran untuk belanja pegawai, terdapat pula anggaran sebesar

Rp2.842.198.000,00 yang diperuntukkan untuk belanja modal. Anggaran belanja modal ini dimanfaatkan untuk pelaksanaan renovasi ruang kerja dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran guna memfasilitasi ruang kerja pegawai dan kebutuhan pendukung proses bekerja.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, analisis jabaan dan analisis beban kerja, masih terdapat selisih jumlah pegawai dengan kebutuhan. Selisih jumlah pegawai ini kemudian dipenuhi melalui pengadaan Honorer dan Tenaga Pendukung Individu (TPI). Kebutuhan total pegawai dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 144 orang sedangkan total ketersediaan sebesar 56 orang. Adanya penambahan pegawai PPPK di tahun 2023 masih belum dapat dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Keterbatasan ruang kerja, menyebabkan beberapa pegawai PPPK masih menempati ruang rapat sebagai ruang kerja. Maka dari itu, untuk mengakomodir hal tersebut perlu dilakukan renovasi dengan memaksimalkan ruang yang tersedia dengan jumlah pegawai dan proyeksi penambahan jumlah pegawai.

Pada tahun 2023, ketersediaan anggaran untuk pembayaran pegawai sudah sesuai namun belum dapat memperhitungkan dengan baik jumlah proyeksi penambahan ataupun pengurangan pegawai sehingga masih terdapat surplus anggaran (terlihat pada total anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 yang dapat diblokir dan dikembalikan ke BA BUN). Selain itu, pelaksanaan renovasi juga sebagai bentuk pengalokasian ruang kerja yang sepadan dengan jumlah pegawai yang ada.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi AKIP menggunakan pedoman Peraturan Menteri PANRB No. 88/ 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan oleh evaluator dari Direktorat PPISDA (Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air) melalui surat Direktorat PPISDA No. UM0201-Pa/102 tanggal 6 Juni 2023 (surat terlampir pada Lampiran 6), menyatakan bahwa nilai AKIP Sekretariat

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2022 adalah 83,46 dengan predikat A (Memuaskan). Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 80,63 dengan predikat A (Memuaskan).

Walaupun telah mendapat kategori memuaskan, masih terdapat beberapa rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditampilkan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP

Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
A. Perencanaan Kinerja	Perlu dilakukan review terhadap Renstra Setditjen agar terdapat keselarasan antara Renstra Setditjen, Renstras DJPI dan Perjanjian Kinerja, sehingga pada penyusunan perjanjian kinerja ditahun selanjutnya tidak terdapat perbedaan lagi	Sesuai dengan ND 185/ND/Ps.1/2023 tanggal 30 Agustus 2023 1. Telah dilakukan pemahasan terkait perbedaan IKK antara PK dan Renstra dan hasil pembahasan dituangkan dalam ND yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Setditjen PI;
B. Pengukuran Kinerja	1. Lebih disiplin dalam mengupload dokumen laporan monitoring kinerja bulanan kedalam e-sakip[2. Perlu dirumuskan mekanisme terkait pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja	2. Akan dilakukan upload dokumen laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-sakip tepat waktu;
C. Pelaporan Kinerja	1. Agar menyampaikan laporan AKIP secara tepat waktu berdasarkan aturan yang berlaku; 2. Perlu menambahkan capaian kinerja dengan instansi/unit organisasi/unit kerja setara; 3. Perlu menambahkan perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah 4. Pada laporan kinerja perlu dibuatkan tabulasi terkait capaian kinerja selama masa periode renstra untuk memudahkan dalam membandingkan capaian di tiap tahunnya	3. Mendorong entitas lebih tinggi (DJPI dan Kementerian PUPR) dalam penetapan mekanisme pemberian <i>reward dan punishment</i> ; 4. Akan dilakukan penyampaian dokumen Laporan AKIP secara tepat waktu; 5. Perbandingan capaian kinerja dengan instansi/unit kerja setara, capaian kinerja dengan target jangka menengah, dan capaian kinerja selama masa periode renstra akan ditambahkan dan disampaikan pada Laporan Kinerja selanjutnya (TA. 2023)
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Berkoordinasi dengan Biro PAKLN terkait progress pengembangan aplikasi evaluasi akuntabilitas kinerja; 2. Untuk tahun selanjutnya agar rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti secara maksimal	

Rekomendasi dari hasil evaluasi semaksimal mungkin untuk dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Namun terdapat beberapa rekomendasi yang memerlukan kebijakan entitas yang lebih tinggi untuk pelaksanaan tindak lanjutnya. Berdasarkan tabel 4.1, rekomendasi penetapan mekanisme pemberian *reward dan punishment* perlu untuk pengaturan lebih lanjut dari entitas yang lebih tinggi.

B. Capaian Kinerja

Prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja.

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR dan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan mendukung capaian Program Dukungan Manajemen Internal Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Pasca revisi Rencana Strategis Kementerian PUPR, terdapat perubahan dalam penilaian capaian kinerja pada organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Hal ini juga berlaku pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan.

Capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 99,37% yang mana lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Adapun capaian pada setiap IKK disampaikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Capaian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja	Target Renstra 2023 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	79,26	87,81	99,37
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	16,13
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	15,00
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	18,75
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	10,00	10,00	10,00

Berdasarkan tabel 4.2, 3 IKK memiliki realisasi lebih tinggi dibandingkan target tahun 2023. Adapun penjelasan nilai pada setiap IKK sebagai berikut:

1. IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dinilai berdasarkan jumlah output yang dihasilkan berdasarkan komponen pada IKK ini. Target pada IKK ini di tahun 2023 adalah 14 layanan dengan realisasi sebesar 16 layanan. Pada IKK ini, capaian kinerja sebesar 16,13%. Capaian dan realisasi di tahun 2023 lebih besar dikarenakan adanya penambahan kegiatan yang meningkatkan penambahan layanan dan output laporan yang dihasilkan.
2. IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki capaian sebesar 15,00%. Output yang dihasilkan pada IKK ini sesuai dengan rencana yang tercantum pada Rencana Strategis yaitu 6 laporan.
3. IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki capaian sebesar 10,00%. Sama halnya dengan IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, pada IKK ini, jumlah output yang dihasilkan sama dengan jumlah yang tercantum dalam Rencana Strategis yaitu 6 laporan. Di tahun 2023, terdapat penambahan kegiatan baru berupa pengelolaan jabatan fungsional analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan untuk mengakomodir kebutuhan djpi sebagai pengampu pada pengelolaan jabatan fungsional analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
4. IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dinilai berdasarkan jumlah laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan dibandingkan dengan target dan jumlah laporan kinerja yang disusun dibandingkan dengan target. Berdasarkan rencana strategis, target output pada IKK ini adalah 2 laporan dan realisasi pada tahun 2023 adalah 4 laporan. Kelebihan jumlah laporan pada IKK ini menjadikan capaian kinerja pada IKK ini meningkat menjadi 15,00%. Tambahan 2 laporan tersebut dari kegiatan tambahan yaitu Penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan KPBU di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2023 dan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko.
5. IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki capaian sebesar 18,75%. Perhitungan pada indikator ini berdasarkan pada jumlah laporan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang disusun dibandingkan dengan target dan jumlah laporan pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target. Capaian kinerja pada IKK ini sebesar 18,75% dikarenakan terdapat kegiatan baru yang menambah output laporan menjadi 4 laporan sedangkan target laporan yang tercantum dalam Rencana Strategis sebanyak 3 laporan. Kegiatan "Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan P3DN DJPI TA 2023" merupakan kegiatan baru di Tahun 2023 dan memberikan kontribusi peningkatan pencapaian output pada IKK ini.
6. IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik memiliki capaian kinerja sebesar 10,00%. IKK ini dinilai berdasarkan jumlah laporan pelaksanaan

pelayanan kehumasan dan pengaduan masyarakat yang disusun dibandingkan dengan target dan jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan media kreatif dan penyebaran informasi yang disusun dibandingkan dengan target. Adanya kegiatan "Pembiayaan Infrastruktur Kreatif *Creative Infrastructure Financing CreatIFF* Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan" yang tidak direncanakan di dalam Rencana Strategis menjadi salah satu kegiatan baru dalam IKK ini dan memberikan kontribusi untuk pencapaian output pada IKK ini.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah berjalan dengan efektif dan efisien selama tahun 2023. Dengan adanya beberapa kali perubahan anggaran untuk mengakomodir beberapa kegiatan baru ditengah keterbatasan anggaran selama tahun 2023 menjadi salah satu bentuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Sesuai dengan capaian kinerja yang telah dijabarkan, dengan anggaran yang tidak jauh berbeda dibandingkan tahun 2022, capaian kinerja tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun 2022. Dalam melaksanakan kegiatan, terdapat beberapa isu yang dihadapi antara lain :

- Adanya Perubahan target capaian kinerja dan metode perhitungan pada Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi di Bulan Desember 2023;
- Koordinasi Nilai IKPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan cenderung rendah jika dibandingkan dengan nilai IKPA di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pelaksanaan pengembangan pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pemberian kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan;

- Koordinasi penyusunan dan pengelolaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Terdapat keterlambatan dalam penyampaian inovasi pengendalian Manajemen Risiko dari target yang telah ditentukan dikarenakan beberapa kegiatan pengendalian belum dapat terselesaikan;
- Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial sebagai salah satu bentuk informasi sekaligus koordinasi dan pengelolaan pengaduan publik maupun menjawab pertanyaan dan sanggahan dari masyarakat terkait informasi sebelumnya;
- Penunjukan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Pembinaan dan Pengelolaan pada Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah;
- Rendahnya ketepatan waktu penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Pelaksanaan renovasi ruang kerja Direktorat dan Gedung A2 untuk memfasilitasi Pegawai yang dilaksanakan pada Triwulan III akhir yang mengakibatkan nilai IKPA pada indikator Pelaksanaan Anggaran menjadi cukup rendah karena belum adanya realisasi belanja modal hingga Triwulan II berakhir; dan
- Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan BPK Tahun 2023 belum dapat sepenuhnya diselesaikan di tahun 2023 dan akan dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun selanjutnya..

Berdasarkan dari isu-isu yang telah disebutkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melakukan beberapa kegiatan

berikut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berikut:

- Menerapkan budaya dialog kinerja antara pimpinan dan staf/pegawai sebagai wujud komunikasi dan komitmen terhadap pengelolaan kinerja dan kegiatan guna mencapai output sesuai dengan rencana;
- Koordinasi dengan satuan kerja, unit kerja, unit organisasi dan/atau kementerian/Lembaga lainnya dalam memaksimalkan pencapaian kinerja;
- Review dan revisi dokumen perencanaan (Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja) sesuai dengan perubahan dan dinamika selama tahun berjalan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Memaksimalkan penyelesaian dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi terkait edukasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui media sosial dan media publikasi elektronik.

C. Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengukur efektivitas dan efisiensi atas keberhasilan dan/atau kegagalan sesuai dengan target yang diperjanjikan. Beberapa aspek dalam perbandingan kinerja pada laporan ini adalah:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja yang akan diperbandingkan merupakan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terhadap capaian kinerja di tahun 2023. Pada tahun 2023, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini juga dikarenakan target kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Kualitas capaian kinerja yang bersumber dari 26 komponen output yang mampu meningkatkan dan mendukung akselerasi ketercapaian pada setiap IKK di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun perbandingan capaian kinerja ditampilkan pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
	2023	2020	2021	2022	2023
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	87,81	55,92	63,35	84,4	99,37
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	13,50	15,00	16,90	16,13
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
	2023	2020	2021	2022	2023
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	10,00	17,50	15,00
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	14,25	15,00	15,00	18,75
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Berdasarkan tabel 4.3, terdapat 3 IKK yang capaian kinerjanya melebihi target dari tahun 2022. Target output Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis adalah 36 laporan/layanan/dokumen sedangkan untuk total realisasi output yang dihasilkan di tahun 2023 adalah 41 laporan/layanan/dokumen.

Capaian pada IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kerap melebihi dari target sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya penambahan kegiatan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan capaian output secara total pada kedua IKK tersebut.

Adapun total capaian pada setiap komponen output pada periode jangka menengah tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Perbandingan Capaian Output Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

IKK	Pengukuran	Komponen	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi					
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip yang disusun dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	5	1	1	1	2	1		5
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	5	1	1	1	2	2		6
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayan Kerumahtanggaan yang disusun dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayan Kerumahtanggaan	11	2	3	2	3	3		11
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran yang	5	1	1	1	1	1		4

IKK	Pengukuran	Komponen	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi					
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	dilaksanakan dibandingkan dengan target									
	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	5	1	1	1	1	1		4
	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	5	1	1	1	1	1		4
	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	5	1	1	1	1	1		4
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan dibandingkan dengan target	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	5	1	1	1	1	1		4
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat yang dilaksanakan dibandingkan dengan target	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	5	1	1	1	1	1		4
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	5	1	1	1	1	1		4
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA	5	1	1	1	1	1		4

IKK	Pengukuran	Komponen	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi					
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP	5	1	1	1	1	1		4
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	5	1	1	1	1	1		4
Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum yang disusun dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	10	2	2	2	2	2		8
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama yang disusun dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	5	1	1	1	1	1		4
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	15	3	3	3	3	3		12
Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	5	1	1	1	1	1		4
	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	10	2	2	2	2	2		8
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai yang dikeluarkan dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	15	3	3	3	3	3		12
Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan	Jumlah Laporan Monev DJPI	6	1	2	1	1	2		6
		Jumlah Laporan Keuangan	5	1	1	1	4	2		8

IKK	Pengukuran	Komponen	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi					
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Pekerjaan Umum dan Perumahan	dibandingkan dengan target									
	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Kinerja	5	1	1	1	1	1		4
Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	5	1	1	1	1	1		4
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	12	2	3	2	2	3		10
Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat yang disusun dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	10	2	2	2	2	2		8
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi yang disusun dibandingkan dengan target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	11	2	3	2	2	2		9

Berdasarkan pada tabel 4.4, terdapat beberapa komponen yang realisasi di tahun 2023 telah memenuhi target jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya penambahan beberapa kegiatan yang menambah output laporan pada komponen tersebut. Selama berjalannya kegiatan dari tahun ke tahun setelah disusunnya rencana strategis kerap mengalami dinamika perubahan yang diakibatkan banyak hal. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh

keputusan internal organisasi maupun diluar organisasi. Hal ini pula berlaku pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Guna terus beradaptasi dengan adanya perubahan dari faktor-faktor dan dinamika yang ada, beberapa penambahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan secara keseluruhan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024. Berdasarkan Rencana Strategis, target output jangka menengah sebanyak 185 laporan/layanan/dokumen. Berdasarkan tabel

4.3, hingga tahun 2023 terdapat beberapa komponen yang realisasinya sudah memenuhi ataupun lebih dari target Rencana Strategis. Total realisasi output dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 160 laporan/layanan/dokumen. Sedangkan capaian realisasi pada setiap IKK ditampilkan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Rencana Strategis 2020-2024	Realisasi 2023
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	84,14	99,37
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	16,13
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	15,00
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	18,75
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	10,00	10,00

Berdasarkan tabel 4.5, realisasi kinerja tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis. Namun untuk target pada setiap IKK di jangka menengah tidak terdapat perbedaan dengan target di tahun 2023. Walaupun target pada setiap IKK tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 (berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan), capaian kinerja pada beberapa IKK telah melampaui target. Realisasi pada IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan

Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah melebihi target dan tidak terdapat realisasi yang lebih rendah dibandingkan target pada ketiga IKK lainnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan standar nasional (*benchmarking*) menggunakan unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022. Perbandingan kedua unit kerja tersebut

dengan mempertimbangkan adanya beberapa kesamaan diantaranya berupa skala unit organisasi yang mirip, hanya memiliki 1 satuan kerja untuk 1 unit organisasi dan terdapat beberapa IKK yang sama. Adapun perbandingan realisasi kinerja antara kedua unit kerja disampaikan pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
% Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Indikator Kinerja	Realisasi Sekretariat DJPI Tahun 2023 (%)	Realisasi Sekretariat Itjen Tahun 2022 (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	99,37	89,00
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	107,50	99,00
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	100,00	-
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	100,00	76,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	150,00	92,99
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	125,00	88,83
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	100,00	-
IKK. Kategori SAKIP Itjen	-	BB
IKK. Nilai SPIP Itjen	-	3,10

Untuk dapat membandingkan capaian kedua capaian kinerja pada kedua instansi, maka capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan konversi menjadi range 100% sesuai dengan range nilai capaian kinerja pada Sekretariat Inspektorat Jenderal. Berdasarkan tabel 4.6, terdapat 4 IKK yang menjadi penilaian pada kedua unit kerja tersebut yaitu:

- Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan;

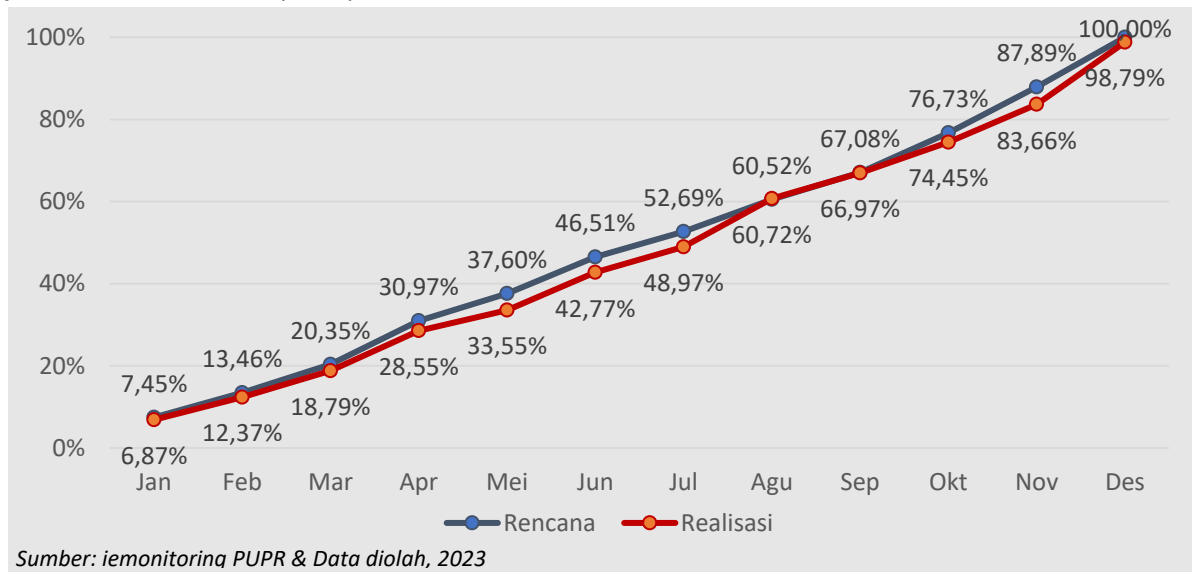
- Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai;
 - Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran; dan
 - Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran
- Penilaian pada untuk IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum dan IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik tidak terdapat pada Sekretariat Inspektorat Jenderal. Sedangkan IKK. Kategori SAKIP dan IKK. Nilai SPIP tidak menjadi penilaian kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2023 lebih baik dibandingkan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2022.

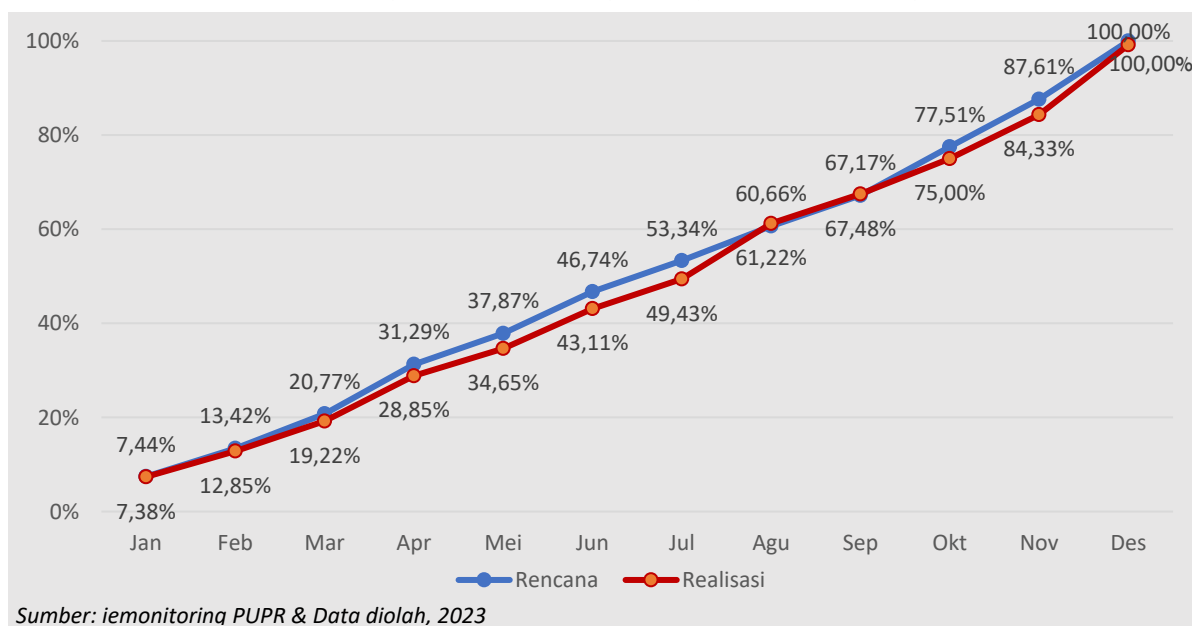
D. Realisasi Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki total anggaran awal sebesar Rp73.945.585.000,00 (*tujuh puluh tiga milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu*

rupiah), terdapat 2 kali perubahan pagu anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2023 dimana perubahan terakhir terjadi pada Revisi DIPA 7 tanggal 9 November 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp68.327.041.000,00 (*enam puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh satu ribu rupiah*). Berdasarkan iemonitoring PUPR tanggal 5 Januari 2024, realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 98,79% atau senilai Rp67.500.644.000,00. Adapun grafik realisasi keuangan dan fisik ditampilkan pada gambar 4.1 dan 4.2 berikut.



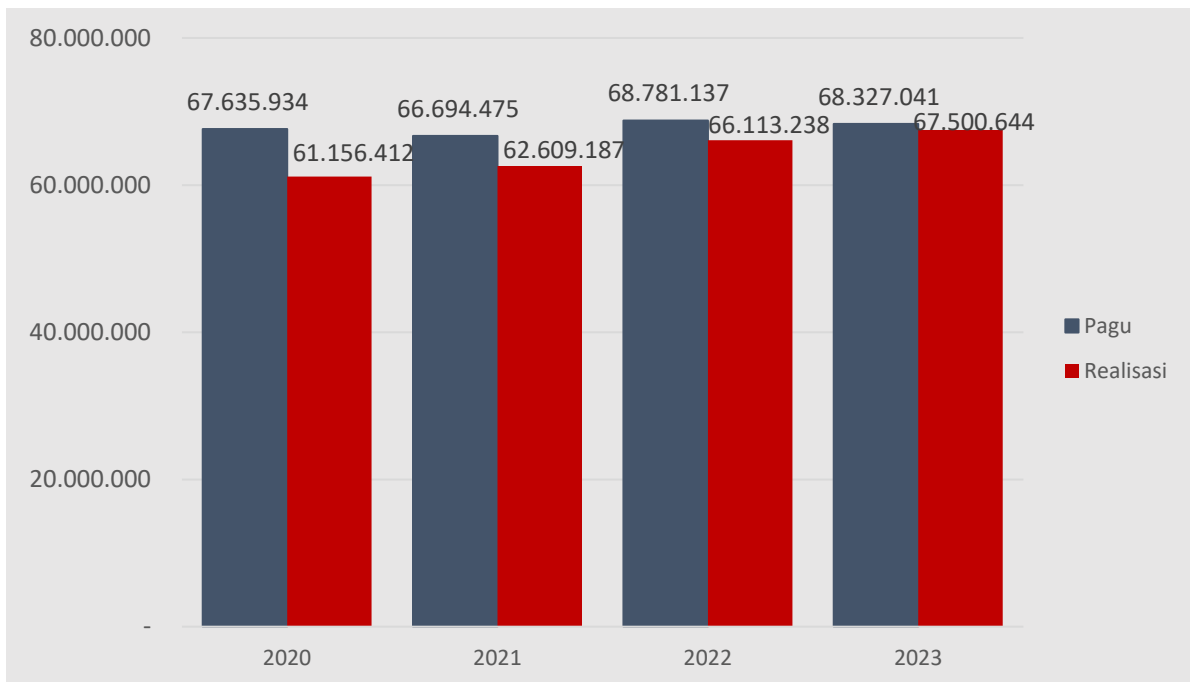
Gambar 4.1
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Rencana Keuangan



Gambar 4.2
Perbandingan Realisasi Fisik dengan Rencana Fisik

Berdasarkan gambar 4.1, terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp826.397.000,00 (1,21%) yang mana sebagian besar terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan yang memiliki sisa sebesar Rp546.491.000,00. Realisasi fisik di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 99,17%.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya, realisasi tahun 2023 merupakan yang tertinggi walaupun jumlah anggaran tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan pagu anggaran dan realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 hingga tahun 2023 ditampilkan pada Gambar 4.3 berikut.



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 4.3
Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 hingga Tahun 2023

Berdasarkan gambar 4.3, pagu anggaran tidak selalu meningkat dari tahun sebelumnya, namun realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pagu tahun 2023 lebih rendah dibandingkan pagu tahun 2022 namun realisasi tahun 2023 merupakan yang tertinggi. Peningkatan realisasi ini dikarenakan adanya penambahan pegawai, kenaikan gaji pegawai, dan meningkatnya harga atau biaya yang harus dikeluarkan untuk bahan/barang/jasa.

E. Analisis Pemanfaatan Laporan Kinerja

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana disampaikan pada subbab capaian kinerja. Pada tahun 2023. Terdapat 7 kegiatan baru yang memberikan kontribusi peningkatan pencapaian kinerja dengan menambah keluaran laporan/layanan/dokumen. Adapun penilaian capaian kinerja dijelaskan pada lampiran 5. Dari 7 kegiatan baru, terdapat 2 kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022 namun belum terdapat dalam Rencana Strategis. Adapun kedua kegiatan tersebut adalah:

- Penyusunan Laporan Manajemen Risiko; dan
- Pembiayaan Infrastruktur Kreatif *Creative Infrastructure Financing* CreatIFF Inovasi

Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan.

Pada tahun 2022, kegiatan *Creative Infrastructure Financing* (CreatIFF) memberikan kontribusi pada IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan karena diidentifikasi sebagai salah satu perayaan hari besar. Sedangkan di tahun 2023, termasuk dalam IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik karena merupakan salah satu strategi komunikasi dan pelaksanaan

pelayanan kehumasan. Beberapa penjelasan terkait capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama tahun 2023 sebagai berikut.

1. Pendampingan Penyusunan Produk Hukum
Produk hukum yang dirancang dan dilaksanakan perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan. Adapun produk hukum yang disusun sepanjang TA. 2023 yang telah ditetapkan/ diundangkan adalah sebanyak 12 Peraturan sebagaimana tercantum dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Produk Hukum

No.	Judul	Pemrakarsa	Tanggal Diundangkan/ Ditetapkan
1	Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Direktorat PPP	10 November 2023
2	Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya	Direktorat PPP	11 Januari 2023
3	Keputusan Menteri PUPR Selaku Ketua Komite Tapera Nomor 30/KPTS/M/2023 tentang Sekretariat Komite Tapera	Direktorat PPP	16 Januari 2023
4	Keputusan Menteri PUPR Nomor 603/KPTS/M/2023 tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Pembangunan Fly Over Panorama I (Sitinjau Lauik I)	Direktorat PPIIJ	5 Juni 2023
5	Keputusan Menteri PUPR Nomor 666/KPTS/M/2023 tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera selatan	Direktorat PPISDA	20 Juni 2023
6	Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/ Pembiayaan Perumahan FLPP serta Besaran SBUM	Direktorat PPP	23 Juni 2023
7	Keputusan Menteri PUPR Nomor 943/KPTS/M/2023 tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PLTM pada Bendungan Jenelata Provinsi Sulawesi Selatan	Direktorat PPISDA	9 Agustus 2023
8	Keputusan Menteri PUPR Nomor	Direktorat PPP	7 September 2023

No.	Judul	Pemrakarsa	Tanggal Diundangkan/ Ditetapkan
	1142/KPTS/M/2023 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat		
9	Keputusan Menteri PUPR Nomor 1237/KPTS/M/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.	Direktorat PPP	19 September 2023
10	Keputusan Menteri PUPR Nomor 1521/KPTS/M/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari Unsur Profesional	Direktorat PPP	25 Oktober 2023
11	Keputusan Menteri PUPR Nomor 1766/KPTS/M/2023 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	Direktorat PPIIJ	7 Desember 2023
12	Keputusan Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera Nomor 1771/KPTS/M/2023 tentang Pembentukan Tim Asesmen Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Direktorat PPP	7 Desember 2023

Selain dari produk hukum yang telah ditetapkan/ dilegalisasi di atas, masih terdapat beberapa produk hukum yang masih dalam proses revisi dan akan dilanjutkan di Tahun Anggaran berikutnya. Selain dari 12 produk hukum tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga menetapkan 31 usulan perjanjian dan 8 usulan pertimbangan hukum selama tahun 2023.

2. Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kegiatan Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bermaksud untuk memberikan layanan Informasi kepada masyarakat dan mitra kerja terkait kebijakan maupun program bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

kepada publik baik internal dan eksternal. Tujuan dari kegiatan ini sebagai sarana untuk menyampaikan informasi melalui kegiatan kehumasan maupun media kepada masyarakat, memastikan pemerataan informasi bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap publikasi yang selama ini telah dilakukan.

Adapun layanan informasi yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2023 yaitu menerima dan menjawab pengaduan masyarakat mengenai status aplikasi SiKasep, pencairan dana SBUM, Program KPR FLPP, SK Manfaat Penerima BP2BT, penyimpangan/ketidakpatuhan pengembang dan permohonan informasi terkait kuota bantuan subsidi. Pengaduan masyarakat yang masuk ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPI sepanjang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Layanan Informasi (Pengaduan Masyarakat) Ke PPID

No.	Media	Tuntas	Belum Tuntas	Total
1	Email	95	14	109
2	Media Sosial	11	30	41
3	SPAN Lapor	79	0	79
TOTAL		185	44	229

Total permohonan Layanan Informasi pengaduan masyarakat dan mitra kerja ke PPID selama Tahun Anggaran 2023 melalui Email, media sosial dan SPAN Lapor sebanyak 229 aduan dimana sebanyak 185 aduan telah selesai (tuntas) dan 44 aduan masih dalam proses (berlanjut).

3. Pengelolaan Pegawai

Proses administrasi pegawai pada saat penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian ASN untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan aturan-aturan yang berlaku. Salah satu kegiatannya berupa pengusulan kenaikan pangkat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengadministrasian pegawai, dan pembinaan jabatan fungsional.

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melakukan pelayanan terhadap pengelolaan pegawai. Hal ini terlihat dari sejumlah 37 pegawai yang diajukan dan disetujui untuk Kenaikan Pangkat, sejumlah 6 pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang pensiun, fasilitasi penyusunan dan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk seluruh pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dari perpindahan (inpassing) jabatan fungsional hingga pengangkatan jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga menjadi pengelola untuk

Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk seluruh Indonesia yang akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab E. Capaian dan Prestasi Lain.

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2023 mengalami perubahan sebagaimana mengacu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Berdasarkan peraturan tersebut tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata Kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map RB 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double

track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian PUPR menyusun kembali Roadmap Penajaman RB 2020-2024 yang terdiri dari RB General dan RB Tematik. Implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan serta program inovasi RB yang diperlukan untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu: 1) Pengentasan Kemiskinan; 2) Peningkatan Investasi; 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintah; 4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Pada RB General, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan ditetapkan oleh Kementerian PUPR dalam Road Map Penajaman 2020-2024. Sedangkan, RB Tematik, DJPI mengusulkan permasalahan dalam Road Map terkait tema Investasi dan Inflasi yang ditampilkan pada tabel 4.9.

Selain mengusulkan roadmap RB Tematik, Pelaksanaan RB di DJPI meliputi:

1. Pelaksanaan rapat pembahasan rencana aksi tidak lanjut RB 2023 berdasarkan hasil penilaian RB tahun 2022;
2. Mengusulkan responden Survei Penilaian Integritas tahun 2023 baik pihak internal maupun eksternal. Pada tahun 2022, DJPI menempati nilai integritas tertinggi berdasarkan unit organisasi di Kementerian PUPR yaitu sebesar 77,06 dari total nilai Kementerian sebesar 73,59.
3. Internalisasi Anti Gratifikasi, *Whistle Blowing System*, Benturan Kepentingan,

dan Pelayanan Prima dalam Penerapan *Core Value* ASN BerAKHLAK di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

4. Monitoring Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan;
5. Menyebarluaskan buku saku Pengendalian Gratifikasi dan Buku Pintar Zona Integritas kepada seluruh pegawai di lingkungan DJPI;
6. Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Pelaksanaan kegiatan Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.



Gambar 4.4
Dokumentasi Penandatanganan Pakta Integritas

Tabel 4.9
Tema yang diusulkan pada Reformasi Birokrasi

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Baseline (2022)	Tahun	Target	Rencana Aksi
Tema Investasi							
1	Peraturan penyelenggaraan investasi di lingkungan Kementerian PUPR belum efektif dalam rangka mempercepat implementasi pembiayaan kreatif/inovatif	Peraturan penyelenggaraan investasi di lingkungan Kementerian PUPR yang dapat mempercepat proses penyiapan proyek melalui skema pembiayaan kreatif/inovatif	Tersedianya peraturan penyelenggaraan investasi yang dapat mempercepat proses penyiapan proyek dengan skema pembiayaan kreatif/inovatif di lingkungan Kementerian PUPR	Regulasi yang ada belum efektif dalam rangka mempercepat implementasi pembiayaan kreatif/inovatif	2024	1 Regulasi (Revisi Peraturan Menteri)	Melakukan revisi Permen PUPR No 2 Tahun 2021 tentang tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur
2	Terbatasnya anggaran pemerintah (APBN) untuk penyediaan infrastruktur bidang PUPR TA 2020-2024	Meningkatnya sumber dana Non APBN untuk pembiayaan/pendanaan infrastruktur bidang PUPR yang berasal dari pembiayaan kreatif dan inovatif	Jumlah dokumen bisnis proyek Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dokumen Prastudi Kelayakan) dengan skema pembiayaan kreatif/inovatif yang siap ditransaksikan	7 dokumen bisnis dengan potensi nilai investasi Rp68,96 T	2023	11 dokumen (kelayakan) bisnis dengan potensi nilai investasi Rp101,35 T	Menyusun dokumen (kelayakan) bisnis proyek KPBU 1. Jalan Trans Papua 2. PLTA Tiga Dihaji 3. DI Komering 4. KPBU Rusun ASN dan Hankam WP 1A dan WP 1B KIPP IKN 5. Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok 6. Jalan Tol Demak - Tuban 7. KPBU Cisaranten Bina Harapan 8. KPBU Rusunawa Karawang Spuur 9. PLTA Leuwikeris 10. SPAM Regional Sinumbra 11. Rusun Perkotaan Surabaya
					2024	11 dokumen (kelayakan) bisnis	Menyusun dokumen (kelayakan) bisnis proyek KPBU 1. Bendungan Merangin

No	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Baseline (2022)	Tahun	Target	Rencana Aksi
						dengan potensi nilai investasi Rp46,84 T	2. PLTM Bendungan Jenelata 3. PLTM Karalloe 4. PLTM Temef 5. KPBU TOD Pasar Jumat - Lebak Bulus 6. SPAM Regional Karian Barat 7. Jalan Tol Tuban-Gresik 8. SPAM Regional Ir. H. Djuanda 9. Bendungan Bodri 10. Fly Over Sitinjau Lauik 11. Rusun Perkotaan Surabaya (Tambak Wedi dan Medokan Ayu)
Tema Inflasi							
3	Berkurangnya akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dikarenakan kenaikan harga jual rumah. Selain itu terjadinya gap yang cukup tinggi antara harga jual rumah dengan pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	Meningkatnya Kemudahan Akses Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap bantuan Subsidi Uang Muka yang diberikan kepada MBR dalam rangka pemenuhan sebagian/seluruh uang muka pemilikan rumah	Jumlah unit penyaluran fasilitas Subsidi Bantuan Uang Muka	Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 225.987 unit.	2023	Kemudahan Akses Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220.000 unit (100%)	Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
					2024	Kemudahan Akses Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 166.000 unit (100%)	Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

F. Capaian dan Prestasi Lain

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Tahun Anggaran 2023 mendapat tambahan 7 Paket Kegiatan baru sehingga menambah capaian kinerja menjadi 99,37% yangmana melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020-2024. Adapun Kinerja lainnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Penatausahaan dan pelaporan BMN

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara (BMN) diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing;
- 2) Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- 4) Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

- 5) Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan;
- 6) Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Dengan memperhatikan dan menetapkan asas-asas yang diuraikan diatas, Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dimaksudkan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai bentuk tertib administrasi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN yang dikuasai oleh unit organisasi. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk perhitungan kekayaan negara pengawasan BMN dan penyusunan kebijakan dalam rangka pengelolaan BMN.

Kegiatan Pelaporan, Penghapusan Barang dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dari siklus Pengelolaan dan Penatausahaan BMN. Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Setiap tahun anggaran terdapat penambahan atas BMN, untuk itu diperlukan pembaharuan pengetahuan, strategi

pengelolaan dan juga penerapan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat administrasi BMN agar BMN dapat digunakan secara optimal. Untuk itu perlu dilakukan updating secara berkala terhadap kemampuan sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya teknologi yang digunakan dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN.

2. Dukungan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melaksanakan kegiatan keselamatan kebakaran Gedung mengingat kedua organisasi ini menempati Gedung kerja yang sama dan usia bangunan Gedung yang sudah cukup tua. Sasaran dari kegiatan ini berupa meningkatnya kesadaran dan mengajarkan kepada seluruh pegawai terkait tindakan yang tepat untuk dilakukan saat bencana maupun dalam mitigasi bencana kebakaran melalui sosialisasi dan pelatihan (drill) bencana kebakaran.

Selain sosialisasi dan pelatihan, pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung pemadaman kebakaran juga dilakukan. Berdasarkan hasil pengecekan, perlu untuk memperbaharui unit APAR dan Hydran air.

3. Pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, maka diperlukan implementasi kebijakan tersebut agar dapat merealisasikan tujuan pembentukan jabatan fungsional yakni :

- 1) mengatasi keterbatasan jumlah SDM di bidang pembiayaan infrastruktur;

- 2) mewujudkan organisasi yang lebih efektif dan efisien sesuai semangat profesionalisme ASN;
- 3) membentuk sistem pembinaan jabatan fungsional pembiayaan infrastruktur;
- 4) mewujudkan sistem pembinaan karier ASN secara lebih terbuka dan kompetitif;
- 5) meningkatkan kinerja ASN untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi organisasi di bidang pembiayaan infrastruktur; dan
- 6) menciptakan kompetensi ASN untuk mewujudkan pembiayaan infrastruktur yang berkualitas.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

4. Penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan KPBU di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2023

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran Kementerian Negara/Lembaga digunakan 3 pendekatan penganggaran yaitu:

- Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam format I-account (*unified budget*);
- Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah - KPJM (*medium term expenditure framework*); dan
- Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bentuk dukungan dari

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terhadap pelaksanaan KPBU yang dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan KPBU di Lingkungan DJPI dari sisi alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan pelaksanaan KPBU. Dengan demikian diharapkan pengeluaran/belanja yang dilakukan memenuhi prinsip efisiensi dan efektif.

Pedoman ini telah menyediakan *framework* alur pikir dalam melakukan evaluasi dan monitoring anggaran. *Framework* tersebut menyuguhkan 3 komponen variabel evaluasi yakni :

- a. Kesesuaian kegiatan proyek terhadap status tahapan proyek yang tersedia untuk evaluator untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tahapan proyek yang sedang berjalan;
- b. Konfirmasi Kebutuhan pada kegiatan yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Komponen ini untuk memandu evaluator dalam melakukan klarifikasi terhadap keperluan kegiatan yang berulang; dan
- c. Kesesuaian nominal anggaran yang diusulkan. Komponen ini digunakan oleh evaluator untuk menyesuaikan anggaran yang diusulkan dengan standar acuan yang digunakan.

Panduan ini telah menyediakan form evaluasi bagi evaluator untuk mengevaluasi dan mengklarifikasi terkait dengan berbagai hal yang dibutuhkan sebagai berikut :

- a. Dashboard form ini adalah langkah pertama untuk memastikan beberapa hal yakni kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan status proyek, jenis pengusulan kegiatan (pengadaan konsultan, pengadaan kegiatan acara dan/atau pengadaan konsultan untuk penyusunan dokumen);
- b. Form evaluasi usulan kegiatan berulang yang tidak membutuhkan tenaga ahli. Form ini digunakan untuk mengklarifikasi terkait dengan kegiatan yang berulang yang berupa

kegiatan pelaksanaan acara (Konsultasi Publik & *Market Sounding*);

- c. Form evaluasi pengadaan tenaga ahli non-output. Form ini digunakan untuk mengklarifikasi terkait dengan kegiatan berulang dalam pengadaan konsultan yang dibutuhkan untuk pendampingan (tidak terdapat keluaran); dan
- d. Form evaluasi pengadaan tenaga ahli output. Form ini digunakan untuk mengklarifikasi terkait dengan kegiatan berulang dalam pengadaan konsultan yang membutuhkan output.

5. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR.

Manajemen Risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul selama proses pencapaian tujuan organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi.

Mengingat pentingnya peran manajemen risiko tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berkomitmen untuk menyelenggarakan manajemen risiko secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung pencapaian dari tujuan organisasi.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat 2

dengan pemilik risiko yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan pengelola risiko yaitu Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan.

Kondisi Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

- 1) Adanya pembentukan tim sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 98/KPTS/Dp/2022 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023.

- 2) Pada tahun 2023 terdapat 11 pernyataan risiko yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengendalian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

Tabel 4.10
Pernyataan Risiko yang Menjadi Prioritas

No	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko
1	Terjadi kebakaran pada gedung A1 dan A2 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Risiko Kecelakaan Kerja
2	Ketidaksesuaian standar ukuran gedung perkantoran	Risiko Layanan
3	Kerusakan dan kehilangan BMN yang digunakan pihak lain	Risiko Kinerja
4	Ketidaksesuaian dalam penyusunan SKP PNS	Risiko Kinerja
5	Belum optimal penerimaan informasi publik melalui konten media sosial DJPI	Risiko Reputasi
6	Ketidakpatuhan dalam penerapan disiplin, kode etik dan cuti pegawai	Risiko Reputasi
7	Keterlambatan Proses Pengajuan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Risiko Kinerja
8	Nilai Deviasi Halaman 3 DIPA berada di kategori kurang	Risiko Kinerja
9	Paket kegiatan di DJPI belum seluruhnya menerapkan PDN (Produk Dalam Negeri)	Risiko Kinerja
10	Tidak terpenuhinya kualitas infrastruktur layanan internet di DJPI	Risiko Layanan
11	Tidak terpenuhinya layanan pendampingan perjanjian kerjasama	Risiko Layanan

- 3) Setiap triwulan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melakukan *updating* progress penerapan manajemen risiko yang meliputi:

- a. pemantauan pelaksanaan inovasi pengendalian
- b. pemantauan level risiko
- c. tinjauan atas risiko baru/ masalah yang belum teridentifikasi

- 4) Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengadakan salah satu sarana komunikasi

antara pimpinan dan seluruh pegawai terkait manajemen risiko melalui kegiatan Bincang Risiko yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2023. Acara ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari AOI (*Area of Improvement*) pada penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Bincang Risiko merupakan forum diskusi tahunan yang tahun ini mengangkat tema “Risiko Kita, Kita Kelola” sebagai upaya mengomunikasikan manajemen risiko dan pentingnya peran serta seluruh pejabat dan

pegawai untuk dapat bekerja sama dalam pengelolaan risiko DJPI. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 63% pejabat dan pegawai di lingkungan DJPI.

6. Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan P3DN DJPI TA 2023

Guna pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah perlu meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Oleh karenanya, beberapa peraturan telah diterbitkan dan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri digunakan oleh :

- 1) K/L/PD apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri (DN) atau luar negeri (LN);
- 2) BUMN, BUMD, Swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau melalui pola kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Implementasi program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Sedangkan, dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.

Penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing pada Tahun 2022 dibatasi sebesar paling tinggi 10% dan pada Tahun 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5% dari pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai Surat Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi nomor BK.0403-Kd/1080 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penyampaian Buku KITA (Kendali Impor dan Tenaga Asing) terkait Mekanisme Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sesuai Surat Menteri PUPR nomor PB.0101-Mn/2075, Penggunaan barang impor

dan tenaga kerja asing dapat diberikan persetujuan dengan syarat:

- 1) Memperhatikan urutan prioritas penggunaan produk dan tenaga kerja dalam negeri;
- 2) Memastikan ketersediaan produk dan tenaga kerja dalam negeri melalui sumber informasi yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Persetujuan penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing dapat diberikan dengan pembagian kewenangan berdasarkan nilai pengadaan impor dan tenaga kerja asing sebagai berikut :

Tabel 4.11

Nilai Pengadaan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Persetujuan Jabatan

No	Jabatan	Nilai Pengadaan
1	Menteri	di atas Rp1.000.000.000,00
2	Pejabat Tinggi Madya	paling banyak Rp1.000.000.000,00
3	Pejabat Tinggi Pratama/ Kepala Satuan Kerja Unit Eselon II	paling banyak Rp500.000.000,00
4	Kepala Balai/ Kepala Satuan Kerja Unit Eselon III	paling banyak Rp200.000.000,00
5	Kepala Satuan Kerja	paling banyak Rp100.000.000,00

Permohonan persetujuan penggunaan barang impor dan TKA dilakukan terhadap seluruh barang dalam satu paket pengadaan yang sama (tidak dipecah) dan dilaporkan secara berjenjang oleh pejabat terkait kepada pejabat yang berwenang di atasnya dengan menyampaikan nota dinas.

7. Pembiayaan Infrastruktur Kreatif *Creative Infrastructure Financing* CreatIFF Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Kementerian PUPR melalui Visium 2030 menargetkan pembangunan Bendungan Multiguna untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m3/kapita/tahun, 100% *smart living*, dan Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda

dengan memanfaatkan material lokal dan teknologi *recycle*. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan investasi diindikasikan sebesar Rp2.058 triliun pada tahun 2024, sementara alokasi APBN hanya mampu memenuhi 30% dari kebutuhan tersebut, sehingga terdapat *funding gap* sebesar Rp1.435 Triliun atau 70% yang perlu diatasi dengan pendanaan alternatif salah satunya melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggagas transformasi kebijakan penyelenggaraan KPBU melalui strategi **3 Bold Action** yakni:

1. Upaya *Fast Track* KPBU melalui penyederhanaan proses dan durasi tahap persiapan dan transaksi KPBU yang semula membutuhkan waktu 2,5 tahun hingga 4 tahun dipersingkat menjadi hanya 9 bulan;
2. Mewujudkan kepastian berinvestasi yang lebih optimal melalui pengembangan inovasi penjaminan dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan *bankability* proyek seperti: implementasi *Minimum Revenue Guarantee* (MRG), Dukungan *Viability Gap Fund* (VGF) dan *Viability Gap Financing* (VGFinancing), serta modifikasi KPBU dengan *Hybrid Annuity Model* (HAM);
3. Mengintegrasikan prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG) sebagai upaya meningkatkan implementasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta meningkatkan potensi untuk mengakses pembiayaan dan pendanaan alternatif dari berbagai lembaga donor baik domestik maupun internasional.

CreatiFF 2023 bertujuan untuk menjaring masukan dari investor dan para pemangku kepentingan terkait penerapan konsep **3 Bold Actions** dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur PUPR yang berkelanjutan, dengan harapan output kegiatan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran pentingnya tata kelola dalam proses bisnis KPBU sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan KPBU untuk mewujudkan strategi **3 Bold Actions** di Kementerian PUPR;
2. Sebagai bahan perumusan kebijakan perbaikan tata kelola yang strategis, *implementable*, dan solutif untuk sektor KPBU;

Sebagai bentuk dialog konstruktif bagi para pemangku kepentingan untuk mewujudkan penyelenggaraan **Three Bold Actions** di Kementerian PUPR dengan tetap memperhatikan prinsip transparan dan akuntabel. Kegiatan CreatiFF 2023 dihadiri 205 peserta.

8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator penilaian IKPA adalah :

- 1) Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri atas:

- Revisi DIPA; dan
- Deviasi Halaman III DIPA.

- 2) Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:

- Penyerapan Anggaran;
- Belanja Kontraktual;
- Penyelesaian Tagihan;

- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP); dan
- Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

3) Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indikator Capaian Output.

Nilai IKPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari satu Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun nilai IKPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut.

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	139	033	631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	Nilai	100.00	53.59	80.84	91.00	98.95	94.33	100.00	100.00	89.96	100%	89.96
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	5.36	16.17	9.10	9.90	9.43	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	76.80				93.02			100.00			

Gambar 4.5
Nilai IKPA Tahun 2023

Berdasarkan gambar 4.5, nilai IKPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 89,96 dimana nilai ini lebih baik dibandingkan dengan nilai IKPA tahun 2022 (nilai akhir 80,96). Adapun indikator dengan nilai terendah adalah indikator Deviasi Halaman III DIPA (nilai 53,59). Selain itu, nilai indikator pada Penyerapan Anggaran tidak cukup baik dikarenakan bobot pada indikator ini cukup besar yaitu 20%. Dari 8 indikator penilaian IKPA, hanya indikator Capaian Output yang dapat dilakukan intervensi setiap bulannya melalui pengisian manual oleh petugas Satuan Kerja.

9. Penetapan SE Dirjen terkait Perjalanan Dinas yang dimanfaatkan oleh Sekjen dan Kementerian PUPR

Adanya temuan serta penetapan at cost terkait biaya Perjalanan Dinas dilingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menjadi dasar penyusunan Surat Edaran Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ini. Dengan bekerjasama antara Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam penyusunan penetapan dan peraturan dalam

pembayaran pelaksanaan Perjalanan Dinas. Adapun surat ini dapat dilihat pada Lampiran 4.

Penetapan SE ini kemudian disebarluaskan dan agar dapat dijadikan acuan pada Unit Organisasi lain di Kementerian PUPR untuk menjadi dasar pembayaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2023 telah menyampaikan capaian kinerja yang disertai kendala dan tindak lanjut yang telah dilakukan. Selama setahun pelaksanaan kegiatan dan anggaran, beberapa informasi penting yang dapat dirangkum sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Kesimpulan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari 3 bagian yaitu (1) Bagian

Perencanaan, Program dan keuangan, (2) Bagian Kepegawaian dan Umum, dan (3) Bagian Hukum dan Komunikasi Publik;

2. Total pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 126 orang pegawai yang terdiri dari 56 orang PNS, 2 orang PPPK, 61 orang Pegawai Honorer dan 18 orang Pegawai Konsultan Individu;

3. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 sebesar 99,37% yang mana lebih tinggi dibandingkan target tahun 2023 maupun capaian tahun 2022 (ditampilkan pada tabel 5.1).

Tabel 5.1
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja	Baseline 2022 (%)	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	84,40	87,81	99,37
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	16,90	15,00	16,13
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	17,50	10,00	15,00
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	18,75
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	10,00	10,00	10,00

Nilai pada IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan IKK yang memiliki realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan target. Capaian pada setiap IKK sebagai berikut :

- 1) IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki target 14 layanan dengan realisasi sebesar 16 layanan. Pada IKK ini, capaian kinerja sebesar 16,13%.
- 2) IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki capaian sebesar 15,00% dengan total output 6 laporan.
- 3) IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan

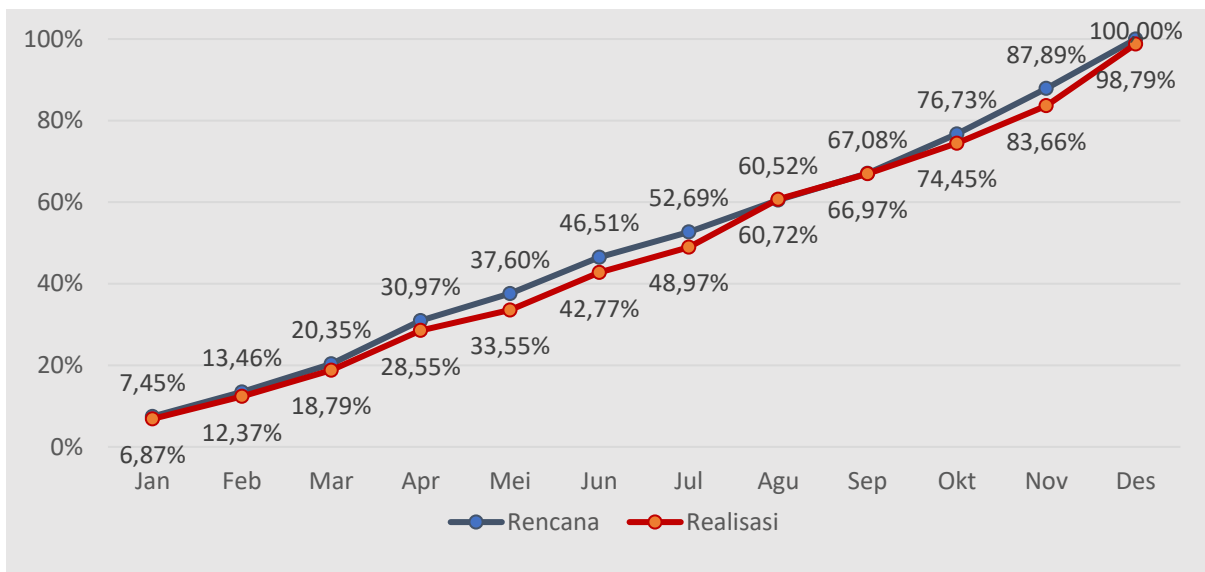
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki capaian sebesar 10,00%. Jumlah output yang dihasilkan yaitu 6 laporan.

- 4) IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki target output sebanyak 2 laporan dan realisasi sebanyak 4 laporan.
 - 5) IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki capaian sebesar 18,75%. Terdapat kegiatan baru yang menambah output laporan menjadi 4 laporan sedangkan target laporan yang tercantum dalam Rencana Strategis sebanyak 3 laporan.
 - 6) IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik memiliki capaian kinerja sebesar 10,00%.
4. Realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 98,79% atau senilai Rp67.500.644.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp68.327.041.000,00. Adapun realisasi pada setiap Rincian Output ditampilkan pada Tabel 5.2. berikut.

Tabel 5.2
Realisasi Keuangan

(Status iemonitoring PUPR tanggal 5 Januari 2024)

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Pagu	Realisasi	Keu (%)		Fisik (%)	
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL
1	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	68.327.041	67.500.644	100,00	98,79	100,00	100,0
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	61.801.995	61.108.217	100,00	98,88	100,00	100,0
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.842.198	2.801.089	100,00	98,55	100,00	100,0
4	Layanan Manajemen SDM Internal	1.015.000	984.480	100,00	96,99	100,00	100,0
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.667.848	2.606.857	100,00	97,71	100,00	100,0



Gambar 5.1
Kurva S Tahun Anggaran 2023

Dalam pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan kegiatan dan realisasi anggaran berdasarkan rencana yang telah disusun. Realisasi anggaran dilakukan dengan menjaga nilai deviasi pada setiap bulannya pada rentang maksimal +5% dan -5%. Adapun kurva S dari rencana dan realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sepanjang tahun 2023 ditampilkan pada Gambar 5.1.

B. Faktor Pendukung Keberhasilan

Selama tahun anggaran 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah mengalami 2 kali perubahan anggaran sesuai dengan Revisi DIPA 6 (terbit tanggal 31 Juli 2023) dan Revisi DIPA 7 (terbit tanggal 9 November 2023) untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah :

1. Terdapat 7 kegiatan baru yang mendukung penambahan penilaian untuk capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Diantara 7 paket kegiatan baru tersebut,

terdapat 2 kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022, yaitu:

- Penyusunan Laporan Manajemen Risiko; dan
 - Pembiayaan Infrastruktur Kreatif *Creative Infrastructure Financing* CreatIFF Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan;
2. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik telah melakukan pendampingan penyusunan produk hukum selama tahun 2023 dan yang telah ditetapkan/diundangkan sebanyak 12 buah peraturan. Selain itu, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga menetapkan 31 usulan perjanjian dan 8 usulan pertimbangan hukum selama tahun 2023;
3. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik juga telah melaksanakan penerimaan dan penindaklanjutan terhadap pengaduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui e-mail, media sosial dan SPAN Lapor sebanyak 229 aduan dimana sebanyak 185 aduan telah selesai (tuntas) dan 44 aduan masih dalam proses (berlanjut);
4. Peningkatan jumlah pengikut pada akun media sosial Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

yang dibarengi dengan peningkatan jumlah feed dan post secara berkala;

5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. mengusulkan permasalahan dalam Road Map RB General dan RB Tematik terkait tema Investasi dan Inflasi;

6. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2023 adalah 89,96 dimana lebih baik dibandingkan dengan nilai IKPA pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 89,09;

7. Peningkatan pelayanan kepegawaian salah satunya dengan ditetapkannya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai pembina pada Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan

8. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

C. Permasalahan

Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut:

- Adanya Perubahan target capaian kinerja dan metode perhitungan pada Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi di Bulan Desember 2023;
- Koordinasi Nilai IKPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan cenderung rendah jika dibandingkan dengan nilai IKPA di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pelaksanaan pengembangan pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pemberian kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan;

- Koordinasi penyusunan dan pengelolaan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Terdapat keterlambatan dalam penyampaian inovasi pengendalian Manajemen Risiko dari target yang telah ditentukan dikarenakan beberapa kegiatan pengendalian belum dapat terselesaikan;
- Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial sebagai salah satu bentuk informasi sekaligus koordinasi dan pengelolaan pengaduan publik maupun menjawab pertanyaan dan sanggahan dari masyarakat terkait informasi sebelumnya;
- Penunjukan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Pembinaan dan Pengelolaan pada Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah;
- Rendahnya ketepatan waktu penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Pelaksanaan renovasi ruang kerja Direktorat dan Gedung A2 untuk memfasilitasi Pegawai yang dilaksanakan pada Triwulan III akhir yang mengakibatkan nilai IKPA pada indikator Pelaksanaan Anggaran menjadi cukup rendah karena belum adanya realisasi belanja modal hingga Triwulan II berakhir;
- Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan BPK Tahun 2023 belum dapat sepenuhnya diselesaikan di tahun 2023 dan akan dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun selanjutnya
- Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan dan memperbesar gap antara rencana dengan realisasi;
- Terdapat perbedaan antara realisasi belanja yang dilakukan dalam pemenuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan rencana yang disampaikan dalam aplikasi SIMAN.

Perbedaan ini menyebabkan adanya perubahan data pada SIMAN;

- Terdapat keterlambatan dalam penyampaian inovasi pengendalian Risiko pada Manajemen Risiko dari target yang telah ditentukan dikarenakan beberapa kegiatan pengendalian belum dapat terselesaikan;
- Pelaksanaan revisi anggaran yang dilakukan lebih dari 1 kali dalam setiap triwulan dikarenakan adanya permintaan kebutuhan dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan (penundaan pelaksanaan hingga menunggu DIPA Revisi terbit) dan juga mempengaruhi nilai indikator Deviasi Hal 3 dan indikator Penyerapan Anggaran pada IKPA ;
- Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan hari puncak *Creative Infrastructure Financing* (CreatIFF) tahun 2023 dikarenakan mengikuti kesediaan jadwal Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
- Rendahnya ketepatan waktu penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

D. Rekomendasi

Berdasarkan kepada kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dan menghadapi beberapa kendala/permasalahan yang terjadi selama tahun anggaran 2023, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi berupa:

1. Melakukan dan terus meningkatkan fungsi pelayanan terhadap seluruh unsur di Direktorat Jenderal dengan baik;
2. Menerapkan budaya dialog kinerja antara pimpinan dan staf/pegawai sebagai wujud komunikasi dan komitmen terhadap pengelolaan kinerja dan kegiatan guna mencapai output sesuai dengan rencana;
3. Koordinasi dengan satuan kerja, unit kerja, unit organisasi dan/atau kementerian/Lembaga lainnya dalam memaksimalkan pencapaian kinerja;
4. Review dan revisi dokumen perencanaan (Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja) sesuai dengan perubahan dan dinamika selama tahun berjalan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
5. Memaksimalkan penyelesaian dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
6. Merencanakan pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya sebaik mungkin dengan mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun berjalan/sebelumnya;
7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk meminimalisir adanya revisi selama pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan;
8. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
9. Menyelesaikan lelang pelaksanaan renovasi sebelum triwulan 1 berakhir sehingga pelaksanaan renovasi dapat selesai sebelum triwulan IV;
10. Pelaksanaan renovasi tidak dilakukan di triwulan 4 (3 bulan terakhir/mendekati akhir tahun anggaran) untuk menghindari gagal lelang ataupun pembayaran tertunda serta menghindari nilai rendahnya nilai IKPA di akhir tahun;
11. Segera menyusun penyesuaian dengan adanya kenaikan Gaji PNS dan penambahan Pegawai PPPK;
12. Menyiapkan mitigasi untuk menghindari terjadinya kembali temuan BPK yang terkait dengan administrasi Perjalanan Dinas dan *Loan*;
13. Lebih memperhatikan dan memonitoring pengajuan penambahan kegiatan maupun anggaran agar tidak mengakibatkan

banyaknya revisi anggaran sepanjang tahun;

14. Meningkatkan kesadaran pegawai dalam penyusunan dan penilaian kinerja pegawai tepat waktu melalui sosialisasi dan pemberitahuan rutin dengan surat;
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi terkait edukasi Pembiayaan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui media sosial dan media publikasi elektronik.





LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Pegawai
2. Daftar Kegiatan
3. Daftar Barang Milik Negara
4. SE Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 02/SeE/Op/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
5. Nota Dinas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
 - DIPA Awal
 - DIPA Revisi ke-6
 - DIPA Revisi ke-7
7. Berita Acara Kesepakatan Kinerja

LAMPIRAN 1
Data Pegawai

Pegawai Negeri Sipil

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna S.E., M.T.	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan
2	Sudiro Roi Santoso S.T., M.T.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan		
3	Desy Nina Wulandari S.E., M.T.	Kepala Bagian Perencanaan, Program, Dan Keuangan
4	Nila Kusumastuti, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
5	Fanidya, SE, ME	Analisis Anggaran Ahli Muda
6	Rahmawati Waluyaningsih, S.Kom, MM	Analisis Anggaran Ahli Muda
7	Joko Tri Kusnanto, ST	Analisis Anggaran Ahli Muda
8	Sukirno, S.Ipem	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
9	Puteri Rizqi Amelia, ST	Perencana Ahli Pertama
10	Rindy Roosmala Prameswari, S.ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
11	Wirawan Widiyanto ST	Perencana Ahli Pertama
12	Fikri Nuru Jaman, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
13	Lucky Astri Fitriana SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
14	Sumardi, SE	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
15	Gede Yoga Mahendra, SE	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
16	Diana Suryana Putra, S.AP	Analisis Barang Milik Negara
17	Lutfia Herawati, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Muda
18	Faisal Bagus Prakoso, A.Md.Ak	Pranata Keuangan Apbn Terampil
19	Muhammad Hammami, A.Md.Ak	Pengelola Keuangan (Jfu)
20	Denia Khaerunissa, A.Md.Ak	Pengelola Keuangan (Jfu)
21	Catur Budi Satriawan, S.E.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
22	Tri Wahyuni, S. Kom	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
23	Eka Nisfiasari, S.E.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
24	Ni Puthu Intan Ade Liana, A.P.Kb.N	Pengelola Keuangan (Jfu)
25	Sardi	Pengadministrasi Umum (Jfu)

NO.	NAMA	JABATAN
26	Teuku Ahmad Ridhaudin S.E., M.E.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA
Bagian Kepegawaian dan Umum		
27	Bambang Adhityo S.E., M.M.	Kepala Bagian Kepegawaian Dan Umum
28	Abidin, SIP, M. Si	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya
29	Aisah Dewi Setiawaty S.T., M.Si.	Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Madya
30	Jaffri, S.Kom, M.Si	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
31	Ni Wayan Sumila Dewi, S.Sos, M. Ak	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
32	Bayu Kusuma Dwi C.S., ST, M.Si	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Madya
33	Mendung Sunarno, S. AP	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
34	Fitriana Ayu Ningrum, SH	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
35	Rahaju Sutjipta, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda
36	Iin Imania, SE	Arsiparis Ahli Muda
38	Ahmad Muhajir S.E., S.T.	Arsiparis Ahli Muda
40	Tatang Rasydin, S.AP	Arsiparis Ahli Muda
42	Arif Harsa Pradipta, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama (Karyasiswa)
43	Adi Pratomo S.A.P.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
44	Andreas Syahputra Sinurat S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
45	Rio Febrianto Moroisa, S. Kom	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
46	Devy Loviardi, S.T, M.Si	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
47	Romlih	Pengadministrasi Umum (Jfu)
48	Kasno	Teknisi Mesin (Jfu)
49	Natalia P Ginting ST	Analisis Kepegawaian (Jfu)
50	Ahmad Surojo	Petugas Keamanan
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik		
51	Anggoro Widyastika S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik
52	Putrawan, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
53	Fenty Meilisya Syafril S.Sos, M.Si	Pranata Humas Ahli Muda
54	Siska Purnianti S.H., M.Hum.	Analisis Advokasi Hukum

NO.	NAMA	JABATAN
55	Yudhistira Adi Nugroho, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama
55	Ruby Esti Aprillia, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Pertama
56	Mifta Fadya S.Tr.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama (Karyasiswa)
57	Antonius Simbolon S.E., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
58	Si Rahmi Purnamasari, S.Ikom	Pranata Humas Ahli Muda

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

NO.	NAMA	JABATAN
Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan		
1	Mohamad Iqbal, S.Kom	Ahli Pertama - Pranata Komputer
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik		
2	Imam Syahid Izzatur Rahim, A.Md	Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat

Pegawai Honorer

NO.	NAMA	JABATAN
Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan		
1	Yudhantoro, S.Pt, M.Pd	Penelaah Tata Naskah Dinas
2	Erwin, SP	Penyusun Program dan Rencana Anggaran
3	Haerul Anwar, SAP	Penyusun Monev dan Pelaporan
4	Haqqi Harisina, S.Kom	Analisis Sistem Informasi Manajemen
5	Muhammad Jaya AW, SE	Penelaah Keuangan
6	Indriati, A.Md	Penata Keuangan
7	Rahmatullah, A.Md	Penata Keuangan
8	Nurmawati	Pengadministrasi Umum
9	Denny Darmawan	Pengadministrasi Umum
10	Endang Rusmaya	Pengadministrasi Umum
Bagian Kepegawaian dan Umum		
11	Gilang Bayu Perdana, S.Kom, M.M.S.I	Analisis Sistem Informasi Manajemen
12	Sartini, SE	Penelaah Tata Naskah Dinas
13	Suryanah, S.Pd.	Penelaah Tata Naskah Dinas
14	Edi Prastiyo, S.Kom	Analisis Sistem Informasi Manajemen

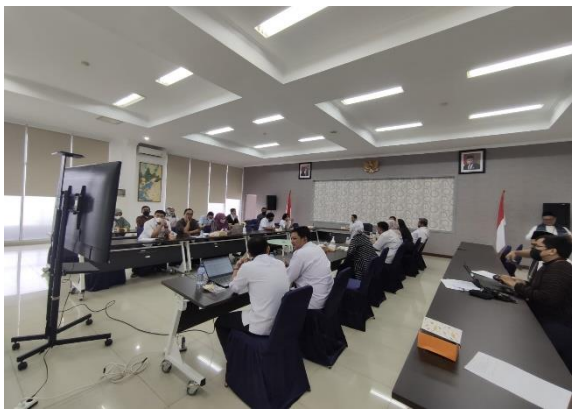
NO.	NAMA	JABATAN
15	Ruri Rumita Maizar, S.Psi	Analisis Karir dan Kompetensi
16	Khoirul Anwar, S.Sos.I	Penelaah Tata Naskah Dinas
17	Budianto, SE	Penelaah Keuangan
18	Haryunta Rizky Pratama, SE	Penelaah Tata Naskah Dinas
19	Muhamad Muklis, SE	Penelaah Tata Naskah Dinas
20	Isam Purbaya, A.Md	Pengolah Data dan Informasi
21	Tatang	Petugas Teknik
22	Suroto	Petugas Teknik
23	Hari Roberto	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
24	Sobirin	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
25	Riki Salman Mubaroq	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
26	Jumadi	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
27	Putri Asiah	Pengadministrasi Umum
28	Marlinah	Pengadministrasi Umum
29	Halimahtus Sadiah	Pengadministrasi Umum
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik		
30	Shara Vadya, S.I.Kom	Penelaah Pelayanan Informasi Publik
31	Dony Triastomo, SE	Penelaah Kebijakan
32	Insan Hermawanto, SAP	Penelaah Kebijakan
33	Andi	Pengadministrasi Umum
34	Dwi Cristianto	Pengadministrasi Umum
35	Komarudin	Pengadministrasi Umum
36	Michael Adha	Pengadministrasi Umum

Konsultan Individu

NO.	NAMA
1	Diane Khatrine Tri Asih
2	Didik Pramono
3	Kurtubi
4	Singgih Zatomi
5	Maisara Humaira Yandari
6	Arfan Haras

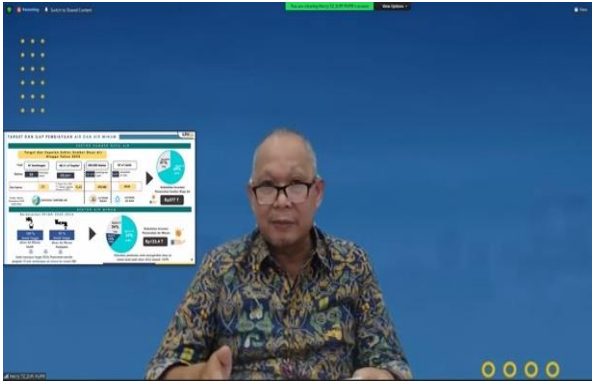
NO.	NAMA
7	Disa Tafira Raimalda
8	Iva Parikhah
9	Stephanes M Anugerah
10	Sopan Sopian
11	Fahmi Nurhuda
12	Adzra Vabiant Purwanti
13	Sri Andriyani
14	Gema Milda Hidayati
15	Zahra Fadhilah Nindita
16	Khoirul Mu'minin
17	Sunardi
18	Afandi

LAMPIRAN 2
Daftar Pelaksanaan Kegiatan

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
1	Rapat Koordinasi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 9 tanggal 3 Januari 2023	
2	Rapat Pembahasan <i>Cost of Fund</i> atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 10 Januari 2023	
3	Rapat Pemantauan Pelaksanaan Respon Manajemen Risiko di Lingkungan Setditjen Triwulan IV TA.2022 di Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 2 Wing 1 tanggal 10 Januari 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
4	Rapat Persiapan Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA.2023 Tingkat Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 10 Januari 2023	
5	Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2022 melalui e-Kinerja di Bekasi tanggal 10 Januari 2023	
6	Peliputan dan Pendokumentasian Acara Peninjauan Perbaikan Jembatan Juwana oleh Menteri PUPR di Pati, Jawa Tengah tanggal 14 Januari 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
7	Rapat Entry Meeting Terinci BPK RI pada Laporan Keuangan DJPI TA.2022 di Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 2 Wing 2 tanggal 17 Januari 2023	
8	Evaluasi hasil pelaksanaan TIM RB DJPI di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 17 Januari 2023	
9	Rapat Koordinasi Penerapan Manajemen Risiko UPR T1 dan Kementerian Triwulan IV TA.2022 (KPBU dan Perumahan) di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 18 Januari 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
10	Peliputan dan Pendokumentasian Seminar Creative Financing dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan di Jakarta tanggal 25 Januari 2023	
11	Peliputan dan Pendokumentasian Rapat persiapan <i>Thematic Session dalam Penyelenggaraan Kick off Meeting World Water Forum ke-10</i> di Jakarta tanggal 26 Januari 2023	
12	Peliputan dan Pendokumentasian Webinar <i>Earned Value Management</i> dalam Pembangunan Infrastruktur via Zoom Meeting tanggal 30 Januari 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
13	Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Detail Pencatatan Informasi TKDN dan Belanja Langsung melalui Aplikasi Bela Pengadaan TA 2023 di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 1 Februari 2023	
14	Koordinasi dan Konfirmasi Tindak Lanjut Ganti Kerugian PT. Nippon Indokoei Co.Ltd. di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 2 Februari 2023	
15	Rapat Informasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 2 Februari 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
16	Meliput dan mendokumentasikan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Tuban di Kantor Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tanggal 2 Februari 2023	
17	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI TA. 2022 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Ta. 2023 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 3 Februari 2023	
18	Rapat Strategi Manajemen ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Jogjakarta tanggal 9-10 Februari 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
19	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Profil Risiko Tingkat unit Organisasi (UPR T1) TA.2023 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Bali tanggal 13-15 Februari 2023	
20	Rapat Finalisasi Exercise Pemanfaatan Anggaran untuk rencana pelaksanaan Kegiatan dan Perjalanan Dinas di Lingkungan DJPI di Ruang Rapat Balai Besar Pelatihan Kemenkes Hang Jebat tanggal 16 Februari 2023	
21	Rapat Penyusunan Analisis Kebutuhan ASN melalui Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) di Ruang Rapat lantai 9 Gedung A1 tanggal 20 Februari 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
22	Meliput dan mendokumentasikan <i>Kick-off Meeting The 10th World Water Forum 2024</i> di Jakarta Convention Center tanggal 20 Februari 2023	
23	Rapat Pembahasan Perubahan Target Capaian Kinerja Setditjen PI TA. 2023 di Ruang Rapat Lantai 2 Wing 1 tanggal 21 Februari 2023	
24	Rapat Koordinasi Anggaran di Ruang Rapat Teratai Pasar Jumat tanggal 27-31 Maret 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
25	Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung A1 tanggal 31 Maret 2023	
26	Koordinasi Tindak Lanjut LHA pada DJPI Semester I 2023 di Bogor tanggal 16 s/d 17 Maret 2023	
27	Sosialisasi Jafung Analisis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Surabaya, Jawa Timur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Hotel Artotel Suites Surabaya tanggal 17 Maret 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
28	Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA.2023 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Bogor tanggal 24-26 Maret 2023	
29	Rapat Implementasi Digipay dan Internalisasi Surat Edaran Dirjen PI Nomor 02/SE/Dp/2023 di Yogyakarta tanggal 30 Maret 2023	
30	Rapat Pembahasan Cost of Fund atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 di Yogyakarta tanggal 31 Maret 2023	

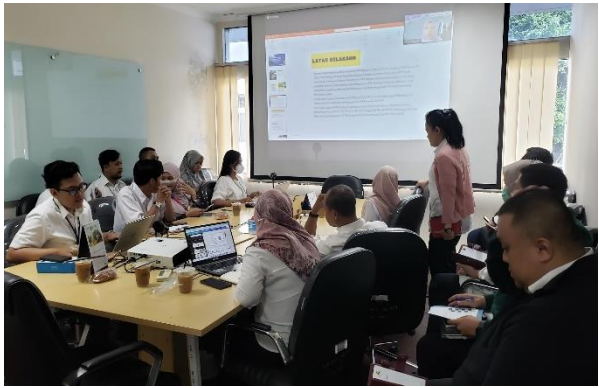
No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
31	Koordinasi Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T1 pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Dirjen PI Lantai 2 Wing 2 tanggal 4-6 April 2023	
32	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA.2023 Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 9 DJPI tanggal 6 April 2023	
33	Meliput dan Mendokumentasikan dan Komunikasi Publik Rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen di Ruang Rapat Lantai 9, Gedung DJPI tanggal 10 April 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
34	Rapat Pembahasan SOP Revisi Anggaran di Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 2 Wing 1 tanggal 11 April 2023	
35	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2023 melalui E-Kinerja di Balai Teknologi Air Minum tanggal 12 April 2023	
36	Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 2 tanggal 12 April 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
37	Membuat video ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri pada Kamis, 13 April dan Jumat, 14 April 2023 di Gedung DJPI.	
38	Pembuatan <i>Booth</i> pelayanan media informasi dan digitalisasi Perundang-undangan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pemasangan tanggal 14 April 2023.	
39	Meliput dan mendokumentasikan acara Halal Bihalal bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), Basuki Hadimuljono di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR tanggal 2 Mei 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
0	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI Bulan April TA. 2023 di Ruang Rapat 1 DJPI Lantai 2 Wing 3 tanggal 10 Mei 2023	
41	FGD Penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak Lainnya atau pemindahan Barang Milik Negara melalui penjualan/lelang di Sotis Hotel tanggal 16 Mei 2023	
42	Rapat Koordinasi Reviu Itjen terkait Tunjangan Kinerja TA.2023 di Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 2 Wing 1 tanggal 19 Mei 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
43	Workshop Peraturan Administrasi Kepegawaian dan Aplikasi Bravo di lingkungan DJPI di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung DJPI tanggal 23 Mei 2023	
44	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Ruang Rapat 1 DJPI Lantai 2 Wing 3 tanggal 26 Mei 2023	
45	Penyusunan Pedoman Penilaian Pengangkatan melalui Penyesuaian/ Inpassing Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Gedung K, Kampus I Politeknik PU tanggal 8-9 Juni 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
46	<i>Kickoff Meeting</i> Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 2023 di Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 2 Wing 1 tanggal 13 Juni 2023	
47	Rapat Finalisasi Penyusunan Tanggapan atas TP BPK RI 2023 pada Loan ADB (ESP) di Ruang Rapat Setditjen lantai 2 Wing 1 tanggal 14 Juni 2023	
48	Rapat Pembahasan PIPK 2023 di Ruang Rapat Setditjen Lantai 2 Wing 1 tanggal 19 Juni 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
49	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI Bulan Mei TA. 2023 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 tanggal 20 Juni 2023	
50	Rapat Koordinasi Penyusunan Indikator Halaman III DIPA dan Capaian Output dalam rangka Meningkatkan Nilai IKPA Triwulan II di Ruang Rapat Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Lantai 2 Wing 1 tanggal 21 Juni 2023	
51	Workshop Fotografi & Videografi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Bandung tanggal 25-27 Juni 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
52	Kunjungan Lapangan terkait Pemanfaatan BMN dalam Mendukung Kegiatan KPBU di Lingkungan DJPI di Pracetak Buntu Purwokerto, Jawa Tengah tanggal 3 Juli 2023	
53	Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I BA.033.16 dan BA.999 Semester I TA.2023 Ruang Aula Kawasan Bendungan Sukamahi tanggal 6 - 7 Juli 2023	
54	Koordinasi Rapat Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA 2024 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, DJPI tanggal 18 Juli 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
55	Meliput dan mendokumentasikan acara Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kerjasama Hibah <i>Develop-To-Build</i> (D2B) Dan DRIVE Dengan Invest International yang dilaksanakan oleh Direktur PSSPP di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Lantai 2 Wing 2 tanggal 18 Juli 2023	
56	Ngobrol Bareng Direktur PI (Ngopi) di Aula Gedung DJPI lantai 2 tanggal 21 Juli 2023	
57	Internalisasi Pengisian dan Pelaporan Data Target/Proyeksi output pada Aplikasi SAKTI di Ruang Rapat Auditorium Elang Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Hang Jebat tanggal 25 Juli 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
58	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Evaluasi dan Penerapan Manajemen Risiko Triwulan II TA.2023 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta (BBPK Jakarta) Kampus Hang Jebat tanggal 25 - 26 Juli 2023	
59	Focus Group Discussion (FGD) terkait PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung A1 DJPI tanggal 31 Juli 2023	
60	Internalisasi Anti Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan dan Pelayanan Prima dalam Penerapan Core Value ASN BerAKHLAK di Balai Teknologi Air Minum, Bekasi tanggal 3 Agustus 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
61	Peliputan dan pendokumentasian kegiatan Lomba Gateball Tim DJPI di Lapangan Gateball Kementerian PUPR tanggal 7 Agustus 2023	
62	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI Periode Juli TA 2023 di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung A1 DJPI tanggal 9 Agustus 2023	
63	Peliputan dan pendokumentasian kegiatan Lomba Tenis Meja tim DJPI di Jakarta tanggal 9 Agustus 2023	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
64	Internalisasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta tanggal 10 s.d. 11 Agustus 2023	
65	Tindak Lanjut Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 pada 20 September 2023 Ruang Rapat Lantai 9 DJPI	
66	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI Periode Agustus TA. 2023 pada 26 September 2023 di Ruang Rapat 1 DJPI lantai 2 wing 3	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
67	Focus Gruoup Discussion (FGD) Finalisasi Penyusunan Buku “Menyusun Strategi Mendulang Inovasi Catatan 10 Tahun Perjalanan Kementerian PUPR dalam Bidang Pembiayaan Infrastruktur pada 8 September 2023 di Hotel Grand Kemang, Jakarta	
68	Pembahasan Rencana Aksi Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal terhadap SAKIP DJPI pada 4 Oktober 2023 di Ruang Rapat 2 Lantai 2 Wing 3	
69	Pendampingan Reviu Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA.2025 pada 5 s.d. 6 Oktober 2023 di Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Kota Bandung	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
70	Sharing Session Bincang Risiko (Bisik) pada 10 Oktober 2023 di Selsar Lantai 2 Gedung A1 DJPI	
71	Konfirmasi Data Status Pemaketan TA 2024 pada 26 Oktober 2023 di Ruang Rapat Lantai 9, Gedung A1 DJPI	
72	Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI dan Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan DJPI pada 3-5 Oktober 2023 di Balai Teknik Irigasi, Bekasi	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
73	Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan Peserta JF API melalui Penyesuaian pada 16 s.d. 17 Oktober 2023 di Pasar Jumat Jakarta Selatan	
74	Dokumentasi Acara audiensi kerjasama Indonesia Green and Affordble Housing Program (IGAHP) dengan PT. Zerone Teknologi Indonesia pada 20 Oktober 2023 di Ruang Rapat Dirjen PI Lantai 2 Wing 2 DJPI	
75	Focus Group Discussion Penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran KPBU di lingkungan DJPI pada 15 November 2023 di The Belleza Hotel	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
76	Rapat Koordinasi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri DJPI TA 2023 pada Rabu, 29 November 2023 Ruang Rapat Kawasan Hotel Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat	
77	Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada 17 November 2023, di Palembang	
78	Dokumentasi Upacara Bendera dalam rangka Memperingati Hari Pahlawan Tahun 2023 pada 10 November 2023 di Lapangan Upacara Sapta Taruna, Kementerian PUPR	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
79	Dokumentasi pertandingan olahraga dalam Hari Bakti PU ke-78 Tahun 2023	
80	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode November 2023 pada 15 Desember 2023 di Ruang Rapat 1 lantai 2 wing 3 DJPI	
81	Rapat Pembahasan Draft Awal Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023 pada 20 Desember 2023 di Ruang Rapat 1 lantai 2 wing 3 DJPI	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
82	Pelatihan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung pada 12 s.d. 13 Desember 2023 di Ruang Rapat Lantai 9 DJPI	
83	Simulasi Evakuasi Drill pada 14 Desember 2023 di Gedung A1, dengan titik kumpul evakuasi pada area parkir	
84	Impelentasi Core Value ASN BerAKHLAK pada 21 Desember 2023 Ruang Rapat Lantai 9	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
85	Pelaksanaan Kegiatan Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2023 dengan tema “3 BOLD ACTIONS: TEROBOSAN MENUTUP FUNDING GAP INFRASTRUKTUR” pada 13 Desember 2023	

LAMPIRAN 3
Daftar Barang Milik Negara

Gedung A2 Lantai 1

Nama BMN	Jumlah
PC	6
Note Book	2
Printer	5
Scanner	1
AC Split	3
Acces Control system	1
Cubikal	1
Dispenser	1
Elektrik Termometer	1
Kursi Fiber Glas	13
Kursi Kayu	4
LCD Projector	1
Lemari Besi Metal	3
Lemari Kayu	1
Meja Kerja Kayu	4
Rak Besi	1
Televisi	1

Gedung A2 Lantai 2

Nama BMN	Jumlah
PC	13
Note Book	4
Printer	12
Scanner	3
Tablet PC	1
Alat Angkutan Darat Bermotor (KDO)	1
Acces Control system	1
Alat Penghancur Kertas	1
Cubikal	10
Filing Cabinet Besi	7
Kursi Besi Metal	20
Kursi Fiber Glas	15
Lemari Besi Metal	12
Meja Kerja Kayu	18
Meja Rapat	1
Meja Resepsionis	1
Sofa	3
Televisi	2

Gedung A2 Ruang Admin

Nama BMN	Jumlah
PC	5
Acces Poin	2
Lap Top	1
Note Book	1
Printer	2
Router	1
Scanner	2
Switch	1
AC Split	6
Filing Cabinet Besi	3
Kursi Besi Metal	4
Kursi Fiber Glas	8
Lemari Besi Metal	4
Meja Kerja Kayu	5
Nakas	1
Rak Besi	14
Televisi	2
Tripod Camera	1
Voice Recoder	1

Gedung A2 Lantai 4

Nama BMN	Jumlah
AC Split	1
Cubikal	15
Focusing Screen Layar	1
Kursi Besi Metal	1
Kursi Fiber Glas	23
Kursi Kayu	8
Lemari Besi Metal	2
Meja Kerja Kayu	19
Meja Rapat	2
Nakas	6
Unit Power Suplay	1

Nama BMN	Jumlah
PC	1
AC Split	9
Kursi Besi Metal	11
Kursi Fiber Glas	49
Lemari Besi Metal	1
Meja Makan Kayu	1
Meja Resepsionis	4
Nakas	1

Gedung A1, Lantai 2 Wing 1

Nama BMN	Jumlah
PC	46
Lap Top	1
Note Book	15
Printer	33
Scanner	5
Tablet PC	3
Wireless Acces Poin	1
AC Sentral	6
AC Split	5
Acces Control system	1
Air Cleaner	1
Alat Penghancur Kertas	5
Camera Digital	4
Camera Video	1
CCTV	1
Cubikal	50
Dispenser	1
Exhause Fan	1
Filing Cabinet Besi	7
Focusing Screen Layar	1
Handy Came	1
Handy Talky	16
Kitchen set	1
Kursi Besi Metal	7
Kursi Fiber Glas	84
Kursi Kayu	8
LCD Projector	1
Lemari Besi Metal	13
Lemari Kayu	2
Lensa Kamera	2
Meja Kerja Kayu	42
Meja Rapat	2
Meja Resepsionis	1
Nakas	13
Rak Kayu	1
Sound system	1
Televisi	2
Tripod Camera	1
White Board	1
Wireless	1

Gedung A1, Lantai 2 Wing 2

Nama BMN	Jumlah
PC	7
Note Book	1
Printer	2
Scanner	2
Tablet PC	1
Wireless Acces Poin	1
AC Sentral	6
AC Split	4
Acces Control system	1
Air Cleaner	3
Alat Penghancur Kertas	2
Camera Conference	2
Camera Digital	1
Camera Video	1
CCTV	1
Cubikal	7
Dispenser	1
Elektrik Termometer	1
Exhause Fan	1
Filing Cabinet Besi	2
Focusing Screen Layar	1
Kitchen set	1
Kursi Besi Metal	6
Kursi Fiber Glas	42
Kursi Kayu	2
Lampu Blit Kamera	1
Lemari Besi Metal	6
Lemari es	2
Lemari Kayu	7
Lensa Kamera	2
Meja Kerja Kayu	9
Meja Makan Besi	1
Meja Makan Kayu	7
Meja Marmer	2
Meja Rapat	6
Meja Resepsionis	7
Nakas	3
Rak Kayu	1
Sofa	13
Televisi	7

Gedung A1, Lantai 2 Wing 3

Nama BMN	Jumlah
PC	18
Auto Switch/Data Switch	1
Lap Top	9
Monitor	1
Note Book	25
Printer	25
Router	1
Scanner	5
Tablet PC	3
Wireless Acces Poin	1
Alat Angkutan Darat Bermotor (KDO)	1
AC Sentral	9
AC Split	3
Acces Control system	1
Air Cleaner	2
Alat Penghancur Kertas	1
Camera Conference	5
Camera Digital	3
Camera Video	1
CCTV	2
Cubikal	24
Drone	5
Elektrik Termometer	1
Exhause Fan	1
Filing Cabinet Besi	1
Finger Printer and attadance	1
Focusing Screen Layar	3
Kipas Angin	2
Kitchen set	1
Kursi Besi Metal	12
Kursi Fiber Glas	77
LCD Projector	5
Lemari Besi Metal	4
Lemari Display	2
Lemari es	3
Lemari Kayu	8
Lensa Kamera	2
Meja Kerja Kayu	34
Meja Komputer	1
Meja Makan Kayu	3
Meja Rapat	9
Nakas	3
Rak Besi	20
Sofa	1
Televisi	5

Nama BMN	Jumlah
Voice Recoder	1
White Board	1

Gedung A1, Lantai 9

Nama BMN	Jumlah
Monitor	1
AC Split	3
Air Cleaner	2
Focusing Screen Layar	1
Kursi Besi Metal	89
Kursi Fiber Glas	4
LCD Projector	1
Meja Kerja Kayu	3
Meja Makan Kayu	1
Meja Rapat	21
Meja Resepsionis	4
Portable Air Pendingin	2
Sofa	4
Televisi	1
White Board Elektronik	1

LAMPIRAN 4

SE Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 02/SeE/Op/2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

SURAT EDARAN

Nomor: 02/SE/Op/2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

A. UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran khususnya biaya perjalanan dinas perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) melalui teknologi informasi yang tersedia

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan petunjuk yang lebih operasional dalam pelaksanaan perjalanan dinas di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Keputusan Presiden Nomor 107/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

- Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 5. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 07/SE/M/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini sebagai acuan pelaksanaan perjalanan dinas di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan perjalanan dinas di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban; dan
3. Lain-lain.

E. PERENCANAAN PERJALANAN DINAS

1. Perencanaan perjalanan dinas dilakukan dalam bentuk pelaksanaan perjalanan dinas dan harus memilih moda transportasi atau kombinasi yang paling efisien.
2. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan moda transportasi kendaraan pribadi maka dalam Surat Tugas (ST) agar mencantumkan moda transportasi kendaraan pribadi dan tidak mencantumkan moda transportasi kendaraan umum.

F. PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Transportasi

1. Perjalanan Dinas yang melebihi batas kota di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilakukan dengan moda transportasi yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kendaraan Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

2. Biaya transport Perjalanan Dinas yang melebihi batas kota dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran yang sah (*at cost*) dan tidak melebihi satuan biaya transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.
3. Biaya transport Perjalanan Dinas yang melebihi batas kota untuk wilayah sekitar Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan moda transportasi kendaraan pribadi dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran yang sah (*at cost*) dan tidak melebihi nilai kewajaran.
4. Pelaksana perjalanan dinas harus memilih moda transportasi atau kombinasi yang paling efisien.
5. Pelaksana perjalanan dinas menggunakan kelas transportasi sesuai dengan tingkat biaya perjalanan dinas dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
6. Moda transportasi darat umum yang dapat digunakan antara lain Kereta Api, Bus, Travel, Taksi/ Taksi *online*.
7. Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi dapat diberikan transport berupa BBM dan TOL (bila ada). Batas tertinggi kewajaran biaya transport kendaraan pribadi adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, biaya transport (PP) tidak melebihi Rp. 350.000,- (termasuk Tol) untuk kendaraan roda-4 dan Rp 250.000,- untuk kendaraan roda-2.
 - b. Untuk wilayah Depok dan sekitarnya, biaya transport (PP) tidak melebihi Rp 200.000,- (termasuk Tol) untuk kendaraan roda-4 dan Rp 100.000,- untuk kendaraan roda-2.
 - c. Untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, biaya transport (PP) tidak melebihi Rp 250.000,- (termasuk Tol) untuk kendaraan roda-4, dan Rp 150.000,- untuk kendaraan roda-2.
 - d. Untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya, biaya transport (PP) tidak melebihi Rp 300.000,- (termasuk Tol) untuk kendaraan roda-4, dan Rp 200.000,- untuk kendaraan roda-2.

8. Apabila biaya transportasi perjalanan dinas luar kota yang menggunakan kendaraan pribadi melebihi batas tertinggi kewajaran harga, pelaksana perjalanan dinas harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini dengan menyampaikan perhitungan jarak dari tempat kedudukan ke lokasi kegiatan dan jenis kendaraan yang digunakan (cc mesin kendaraan yang digunakan).
9. Sewa kendaraan hanya digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka survey/detasering, dan/atau perjalanan dinas Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. Biaya sewa kendaraan dibebankan di akun Belanja Sewa (522141).
10. Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas harus melampirkan dokumen berkas perjalanan dinas antara lain sebagai berikut:
 - a. Apabila menggunakan sewa kendaraan:
 - 1) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk pelaksanaan survey/detasering.
 - 2) Kuitansi atau bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
 - 3) Fotocopy STNK, SIM, NPWP badan usaha.
 - 4) Foto Kendaraan yang disewa.
 - 5) Faktur pajak.
 - 6) Laporan Perjalanan Dinas dan dokumentasi.
 - b. Apabila menggunakan pesawat terbang, kereta api, bis, dan travel :
 - 1) Surat Perintah Tugas.
 - 2) Tiket Pesawat / Kereta Api / Bis / Travel.
 - 3) *Boarding Pass*.
 - 4) Bukti pembayaran taksi dari tempat kedudukan ke bandara/terminal/stasiun/*pool travel* dan sebaliknya.
 - 5) Bukti pembayaran taksi dari bandara/terminal/stasiun/*pool travel* ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 - 6) Laporan Perjalanan Dinas dan dokumentasi.
 - c. Apabila menggunakan taksi atau taksi *online* :
 - 1) Surat Perintah Tugas.
 - 2) Bukti pembayaran taksi yang sah berupa *print out*/cetak argometer taksi, atau cetak email bukti pembayaran perjalanan (taksi *online*) atau cetak

screenshot pembayaran pada aplikasi (taksi *online*).

- 3) Dalam hal *print out*/cetak argometer tidak tersedia, bukti pertanggungjawaban dapat menggunakan foto harga pada argometer dan nomor lambung taksi yang digunakan.
 - 4) Bukti Pembayaran TOL (bila menggunakan TOL). Dalam hal bukti pembayaran TOL tidak tersedia, bukti pertanggungjawaban dapat berupa *print out* atau *screenshot* riwayat penggunaan kartu uang elektronik dari ATM atau aplikasi.
 - 5) Laporan Perjalanan Dinas dan dokumentasi.
- d. Apabila menggunakan kendaraan pribadi (Roda 4 atau Roda 2):
- 1) Surat Perintah Tugas.
 - 2) Bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di tempat kedudukan, tempat tujuan, dan/atau lokasi sepanjang rute yang dilalui dan dalam waktu perjalanan dinas.
 - 3) Bukti Pembayaran TOL (bila menggunakan TOL). Dalam hal bukti pembayaran TOL tidak tersedia, bukti pertanggungjawaban dapat berupa *print out* atau *screenshot* riwayat penggunaan kartu uang elektronik dari ATM atau aplikasi.
 - 4) Laporan Perjalanan Dinas dan dokumentasi.
- e. Apabila menggunakan Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan melampirkan bukti pembayaran Tol (bila melalui jalan Tol).

B. Uang Harian dan Penginapan

1. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas melebihi 1 hari dan memerlukan penginapan, namun pelaksana perjalanan dinas tidak dapat membuktikan kwitansi penginapan maka dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir B.1 tidak berlaku untuk perjalanan dinas Jabodetabek.
3. Apabila pelaksanaan kegiatan dilakukan di fasilitas milik negara maka diberikan uang harian dikurangi dengan biaya konsumsi dan biaya makan rapat sesuai undangan.

G. LAIN-LAIN

1. Berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas diterima Satuan Kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
2. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diwajibkan melakukan pemeriksaan Covid-19, maka dokumen kuitansi pemeriksaan dipertanggungjawabkan pada akun penanggulangan Covid-19.

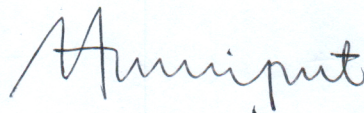
H. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 MARET 2023

DIREKTUR JENDERAL,



HERRY TRISAPUTRA ZUNA
NIP. 196705151996031001

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR : 02 / SE / Dp / 2023
TENTANG :
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No. _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP / NRP / NIK :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport perjalanan dinas yang dikeluarkan dalam rangka (uraian tugas perjalanan dinas) sesuai dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal adalah sebesar Rp, - (.....terbilang).
2. Jumlah biaya tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan sesuai dengan bukti yang disampaikan.
3. Apabila di kemudian hari terdapat temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara dari pengeluaran riil dimaksud, saya bersedia menyetorkan akibat kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal bulan tahun
Pelaksana Perjalanan Dinas

Ttd

Nama Jelas
NIP/NRP/NIK

Pendekatan Perhitungan Transport Bodetabek

Nilai kewajaran biaya transport perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kewajaran Biaya Transpor} = \text{Biaya BBM} + \text{Biaya Tol (pp)}$$

Biaya BBM dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Biaya BBM} = \frac{\text{Jarak Tempuh (km)}}{\text{Konsumsi BBM Kendaraan } (\frac{\text{km}}{\text{l}})} \times \text{Harga BBM (Rp)} \times 1,25 \text{ (safety factor)}$$

Keterangan:

1. Jarak Tempuh adalah total jarak dari tempat kedudukan (kantor atau rumah) ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan.
2. Konsumsi Bahan Bakar adalah jarak yang dapat ditempuh kendaraan untuk satu liter bahan bakar. Asumsi konsumsi bahan bakar yang digunakan untuk menghitung Batas tertinggi Nilai Kewajaran yang tercantum dalam SE adalah 1 : 7 atau 1 liter BM untuk menempuh jarak 7 km, untuk kendaraan roda 4. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 asumsi konsumsi bahan bakar yang digunakan adalah 1 : 15 atau 1 liter BBM untuk menempuh jarak 15 km.
3. Harga BBM per liter. Asumsi jenis bahan bakar yang digunakan untuk menghitung Batas tertinggi Nilai Kewajaran yang tercantum dalam SE adalah Pertamina.
4. *Safety Factor* yang digunakan menghitung Batas tertinggi Nilai Kewajaran adalah 1,25 untuk mengakomodir apabila terjadi kemacetan, pengalihan arus lalu lintas, dan kondisi lainnya.

Contoh Penghitungan Kewajaran Biaya Transpor:

Perjalanan dinas ke wilayah Bogor yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, jarak rata-rata dari tempat kedudukan, dalam hal ini kantor DJPI ke tempat tujuan adalah 56 km. Oleh karena itu, penghitungan Nilai Kewajaran Biaya Transport adalah sebagai berikut:

$$Biaya\ BBM = \frac{56\ km \times 2\ trip}{7\ \left(\frac{km}{l}\right)} \times Rp\ 14.500 \times 1,25\ (safety\ factor)$$

Dengan rumus tersebut diperoleh biaya BBM sebesar Rp 290.000,-. Total biaya tol untuk menuju wilayah Bogor dan kembali ke tempat kedudukan diasumsikan sebesar Rp 60.000,-. Sehingga nilai kewajaran biaya transport perjalanan dinas menuju wilayah bogor arahan Rp 290.000,- ditambah Rp 60.000,- menjadi Rp 350.000,-.

LAMPIRAN 5

Nota Dinas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
Jalan Raden Patah 1 Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264230, (021) 7264230

Nomor : UM 0201-Pa/102
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat
Jenderal Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Tahun Anggaran 2022

Jakarta, 6 Juni 2023

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan.
di- tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 12/KPTS/Dp/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022;
2. Surat Tugas Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Nomor: 39/SPT/Pa/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penugasan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

B. Tujuan Evaluasi

1. Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat implementasi AKIP;
4. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
5. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP; dan
6. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja

3. Penilaian...

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Uraian Hasil Evaluasi

1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP, maka implementasi atas AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 dapat dikategorikan **A** dalam pengertian bahwa **Memuaskan**, dengan pencapaian nilai **83,46%** dengan rincian per komponen:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2022 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	83,46

Hasil implementasi AKIP pada tahun anggaran 2022 meningkat 3,39% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi AKIP tahun anggaran 2021, berikut hasil implementasi AKIP tahun 2021:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2021 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,01
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,71
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,67
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	8,63
5.	Capaian Kinerja	20	13,61
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,63

2. Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP di lingkungan **Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan** disebabkan masih adanya kelemahan dalam komponen/subkomponen AKIP sebagai berikut:

1. Perencanaan..

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
1.	Perencanaan Kinerja	
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	-
	b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	IKK pada PK Setditjen tidak sama dengan IKK pada Renstra Setditjen, akan tetapi IKK pada PK Setditjen sudah sesuai dengan IKK pada Renstra DJPI
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	-
2.	Pengukuran Kinerja	
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	Terjadi keterlambatan dalam melakukan upload laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-sakip
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Pengukuran kinerja belum dijadikan sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
3.	Pelaporan Kinerja	
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Laporan AKIP disampaikan secara tidak tepat waktu
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	- Pada laporan kinerja belum dijelaskan analisa perbandingan capaian kinerja dengan instansi/unit organisasi/unit kerja setara - Pada laporan kinerja belum dijelaskan analisa perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah - Pada laporan kinerja belum dibuatkan tabulasi terkait capaian kinerja selama masa periode renstra
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan	-

Dampak...

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
	dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan teknologi informasi
	c. Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisien Kinerja.	Tindak lanjut atas evaluasi AKIP belum ditindaklanjuti secara maksimal

E. Rekomendasi

No	Komponen	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	Perlu di lakukan review terhadap renstra Setdijen agar terdapat keselarasan antara Renstra Setdijen, Renstra DJPI dan Perjanjian Kinerja. sehingga pada saat penyusunan Perjanjian kinerja di tahun selanjutnya tdk ada perbedaan lagi
2.	Pengukuran Kinerja	- Lebih disiplin dalam mengupload dokumen laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-sakip - Perlu di rumuskan mekanisme terkait pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja
3.	Pelaporan Kinerja	- Agar menyampaikan laporan AKIP secara tepat waktu berdasarkan aturan yang berlaku. - Perlu menambahkan perbandingan capaian kinerja dengan instansi/unit organisasi/unit kerja setara - Perlu menambahkan perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Pada...

No	Komponen	Rekomendasi
		- Pada laporan kinerja perlu dibuatkan tabulasi terkait capaian kinerja selama masa periode renstra untuk memudahkan dalam membandingkan capaian di tiap tahunnya
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	- Berkoordinasi dengan Biro PAKLN terkait progress pengembangan aplikasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja - Untuk tahun selanjutnya agar rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti secara maksimal

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

**Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air,**

**Arvi Argyantoro
NIP. 196409121991031002**

Ditandatangani dengan elektronik

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.



PINDAI KODE QR UNTUK CEK DOKUMEN PDF
TTE OLEH BSE

LAMPIRAN 6

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2023



05:3106-0033-9402-9918

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 165.919.391.000	(SERATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Mumi	Rp.	164.919.391.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	1.000.000.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	1.000.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	164.919.391.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	1.000.000.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	---------------

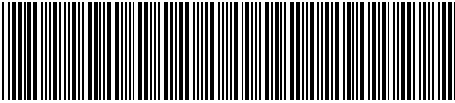
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATRIWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



DS:3106-0033-9402-9918

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	136.687.358.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	136.687.358.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.232.033.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.232.033.000

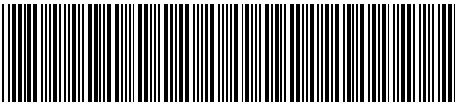
LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.232.033.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.232.033.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	136.687.358.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	78.945.585.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.364.773.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.377.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



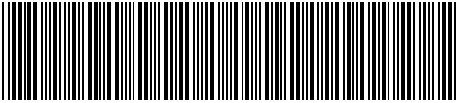
DS:3106-0033-9402-9918

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				29.232.033.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				29.232.033.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.822.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	7.822.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.190.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	3.00	NSPK	2.190.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.720.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.720.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	3.000.033.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	1.00	kegiatan	3.000.033.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	9.500.000.000
Rincian Output	:	01	QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
		02	QAH.002	Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1.00	layanan	5.000.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				136.687.358.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



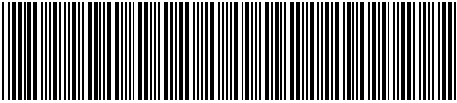
DS:3106-0033-9402-9918

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			78.945.585.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	73.181.169.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	600.000.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	1.100.000.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	1.350.000.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	800.000.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	900.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	350.000.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	68.081.169.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	2.574.416.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.00	Unit	550.000.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	2.024.416.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



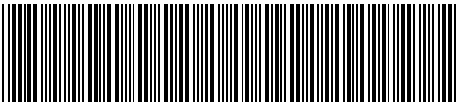
DS:3106-0033-9402-9918

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	600.000.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang	600.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.590.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Dokumen	1.370.000.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2.00	Dokumen	500.000.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.364.773.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.394.773.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	6.144.773.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4.00	Layanan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.970.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.250.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA

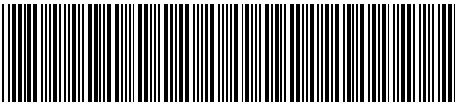


DS:3106-0033-9402-9918

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			46.377.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	25,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	24.957.357.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
		03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.040.000.000
		04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	800.000.000
		05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
		06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000
		07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
		08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.850.000.000
		09	ABF.010 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000
		10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5.00	Rekomendasi Kebijakan	1.300.000.000
		11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.467.357.000
		13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3106-0033-9402-9918

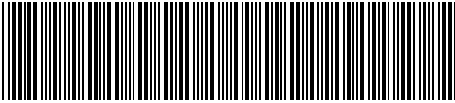
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	13,00	Kesepakatan	14.759.643.000	
Rincian Output		:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	5.00	Kesepakatan	3.599.643.000
		:	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	3.250.000.000
		:	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.910.000.000
		:	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.600.000.000	
Rincian Output		:	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	800.000.000
		:	02	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	NSPK	1.300.000.000
		:	03	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	17,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.060.000.000	
Rincian Output		:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.00	Dokumen	4.060.000.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 1966110211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



DS:3106-0033-9402-9918

I B. SUMBER DANA

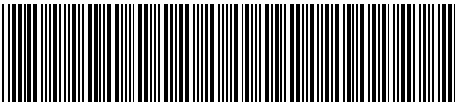
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	165.919.391.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	68.494	Rp.	1.000.000.000
1. Rupiah Murni	Rp.	164.919.391.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	1.000.000.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT B 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	67,57 1.000.000,00	2	1.000.000			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3106-0033-9402-9918

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	39.621.169	123.723.806	2.574.416	-	-	165.919.391	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	29.232.033	-	-	-	29.232.033		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	29.232.033	-	-	-	29.232.033		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.822.000	-	-	-	7.822.000		
01	RM	-	7.822.000	-	-	-	7.822.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.190.000	-	-	-	2.190.000		
01	RM	-	2.190.000	-	-	-	2.190.000		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000		
01	RM	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.000.033	-	-	-	3.000.033		

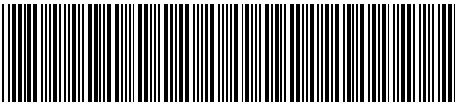
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	3.000.033	-	-	-	3.000.033	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	01 . 54	
01 RM		-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	139	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	39.621.169	94.491.773	2.574.416	-	-	136.687.358		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	39.621.169	36.750.000	2.574.416	-	-	78.945.585		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	39.621.169	33.560.000	-	-	-	73.181.169	01 . 54	
01 RM		39.621.169	33.560.000	-	-	-	73.181.169	139	
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.574.416	-	-	2.574.416	01 . 54	
01 RM		-	-	2.574.416	-	-	2.574.416	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



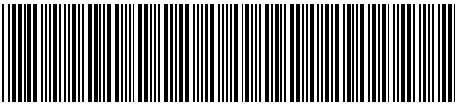
DS:3106-0033-9402-9918

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	600.000	-	-	-	600.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	600.000	-	-	-	600.000	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.590.000	-	-	-	2.590.000	01 . 54	
01 RM		-	2.590.000	-	-	-	2.590.000	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.364.773	-	-	-	11.364.773		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.394.773	-	-	-	7.394.773	01 . 54	
01 RM		-	6.894.773	-	-	-	6.894.773	139	
02 PLN		-	500.000	-	-	-	500.000	140	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



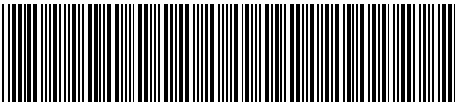
DS:3106-0033-9402-9918

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.970.000	-	-	-	1.970.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	1.970.000	-	-	-	1.970.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	46.377.000	-	-	-	46.377.000		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	24.957.357	-	-	-	24.957.357	01 . 54	
01 RM		-	24.457.357	-	-	-	24.457.357	139	
02 PLN		-	500.000	-	-	-	500.000	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	14.759.643	-	-	-	14.759.643	01 . 54	
01 RM		-	14.759.643	-	-	-	14.759.643	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.600.000	-	-	-	2.600.000	01 . 54	
01 RM		-	2.600.000	-	-	-	2.600.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3106-0033-9402-9918

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.060.000	-	-	-	4.060.000	01 . 54	
01 RM		-	4.060.000	-	-	-	4.060.000	139	
JUMLAH		39.621.169	123.723.806	2.574.416	-	-	165.919.391		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

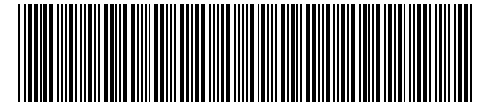
ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 1966110211996031001

DS:3106-0033-9402-9918

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3106-0033-9402-9918

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

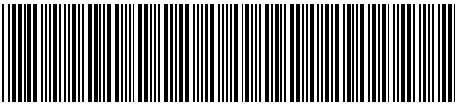
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	463.770	927.540	927.540	2.318.850	2.318.850	4.637.700	6.956.550	8.347.860	9.275.400	6.956.550	3.246.390	46.377.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 1966110211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
IV A. B L O K I R



DS:3106-0033-9402-9918

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

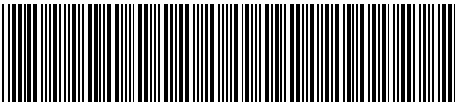
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 1966110211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
IV B. C A T A T A N



DS:3106-0033-9402-9918

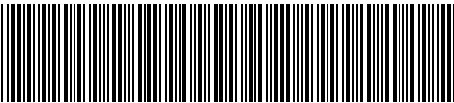
Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 1966110211996031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Revisi ke 06
Tanggal : 31 Juli 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 197.035.796.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TIGA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 158.919.391.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 38.116.405.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 38.116.405.000 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 158.919.391.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 38.116.405.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|

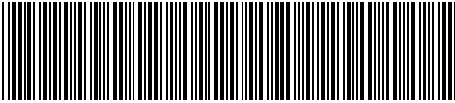
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023

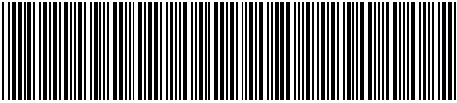


DS:8580-4820-1238-8669

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	167.803.763.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	167.803.763.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.232.033.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.232.033.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023

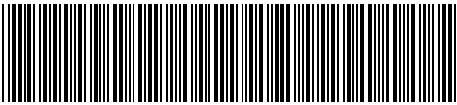


DS:8580-4820-1238-8669

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.232.033.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.232.033.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	167.803.763.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.945.585.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	20.081.976.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	74.776.202.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



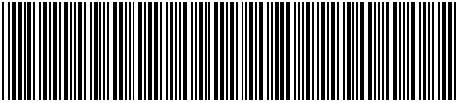
DS:8580-4820-1238-8669

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				29.232.033.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				29.232.033.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.822.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	7.822.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.190.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	3.00	NSPK	2.190.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.720.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.720.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	3.000.033.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (PN)	1.00	kegiatan	3.000.033.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	9.500.000.000
Rincian Output	:	01	QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
		02	QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1.00	layanan	5.000.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				167.803.763.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



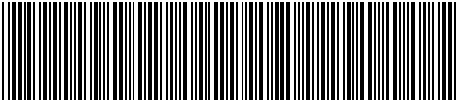
DS:8580-4820-1238-8669

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			72.945.585.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	67.106.169.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	600.000.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	698.664.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	1.734.966.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	800.000.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	825.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	366.370.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	62.081.169.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	2.574.416.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.00	Unit	550.000.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	2.024.416.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	675.000.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang	675.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	8,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.590.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Dokumen	1.380.000.000
		02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	710.000.000
		03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2.00	Dokumen	500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8580-4820-1238-8669

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Kegiatan	:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan				20.081.976.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	16.111.976.000
Rincian Output	:	01	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		10.00	Rekomendasi Kebijakan	14.861.976.000
		02	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.000.000.000
Rincian Output	:	01	EBA.963	Layanan Data dan Informasi		4.00	Layanan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.970.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3.00	Dokumen	720.000.000
		02	EBD.965	Layanan Audit Internal		3.00	Dokumen	1.250.000.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				74.776.202.000	
	:							
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		24,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	52.026.760.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.450.000.000
		02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000.000
		03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.640.000.000
		04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		1.00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000

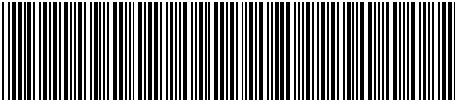
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan, Kajian	
	06	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan 31.969.403.000
	07	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan 1.500.000.000
	08	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan 2.527.500.000
	09	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5.00	Rekomendasi Kebijakan 3.222.500.000
	10	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan 1.000.000.000
	11	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan 2.467.357.000
	12	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan 1.750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 9	:	4197.AEE	Kemitraan	13,00	Kesepakatan 14.759.643.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	5.00 Kesepakatan 3.599.643.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00 Kesepakatan 3.250.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00 Kesepakatan 2.910.000.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00 Kesepakatan 5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar 3.929.799.000
Rincian Output	:	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00 NSPK 1.229.799.000
		02	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00 NSPK 2.200.000.000
		03	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00 NSPK 500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8580-4820-1238-8669

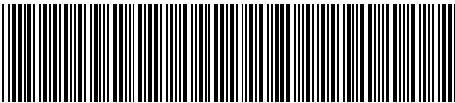
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	17,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.060.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.00	Dokumen	4.060.000.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



DS:8580-4820-1238-8669

I B. SUMBER DANA

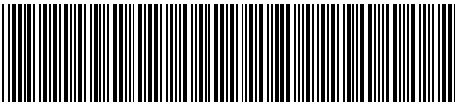
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	197.035.796.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	2.610.713 Rp. 38.116.405.000
1. Rupiah Murni	Rp.	158.919.391.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	38.116.405.000		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIANDVELOPMENTB 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	2.575,43 38.116.405,00	2	38.116.405			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



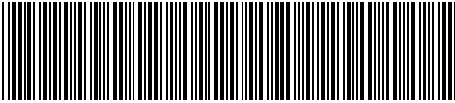
DS:8580-4820-1238-8669

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	33.621.169	160.840.211	2.574.416	-	-	197.035.796	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	29.232.033	-	-	-	29.232.033		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	29.232.033	-	-	-	29.232.033		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.822.000	-	-	-	7.822.000		
01	RM	-	7.822.000	-	-	-	7.822.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.190.000	-	-	-	2.190.000		
01	RM	-	2.190.000	-	-	-	2.190.000		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000		
01	RM	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.000.033	-	-	-	3.000.033		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



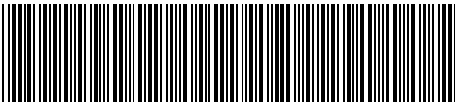
DS:8580-4820-1238-8669

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM 4976.QAH	RM	-	3.000.033	-	-	-	3.000.033	139	
	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	01 . 54	
01 RM 033.16.WA	RM	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	139	
	Program Dukungan Manajemen	33.621.169	131.608.178	2.574.416	-	-	167.803.763		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	33.621.169	36.750.000	2.574.416	-	-	72.945.585		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	33.621.169	33.485.000	-	-	-	67.106.169	01 . 54	
01 RM 4194.EBB	RM	33.621.169	33.485.000	-	-	-	67.106.169	139	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.574.416	-	-	2.574.416	01 . 54	
01 RM	RM	-	-	2.574.416	-	-	2.574.416	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN

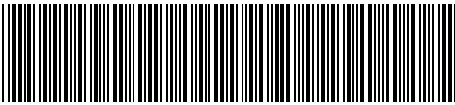


DS:8580-4820-1238-8669

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	675.000	-	-	-	675.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	675.000	-	-	-	675.000	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.590.000	-	-	-	2.590.000	01 . 54	
01 RM		-	2.590.000	-	-	-	2.590.000	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	20.081.976	-	-	-	20.081.976		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	16.111.976	-	-	-	16.111.976	01 . 54	
01 RM		-	6.894.773	-	-	-	6.894.773	139	
02 PLN		-	9.217.203	-	-	-	9.217.203	140	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 54	
01 RM		-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



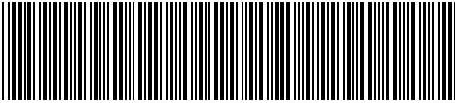
DS:8580-4820-1238-8669

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.970.000	-	-	-	1.970.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	1.970.000	-	-	-	1.970.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	74.776.202	-	-	-	74.776.202		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	52.026.760	-	-	-	52.026.760	01 . 54	
01 RM		-	23.127.558	-	-	-	23.127.558	139	
02 PLN		-	28.899.202	-	-	-	28.899.202	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	14.759.643	-	-	-	14.759.643	01 . 54	
01 RM		-	14.759.643	-	-	-	14.759.643	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.929.799	-	-	-	3.929.799	01 . 54	
01 RM		-	3.929.799	-	-	-	3.929.799	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8580-4820-1238-8669

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.060.000	-	-	-	4.060.000	01 . 54	
01 RM		-	4.060.000	-	-	-	4.060.000	139	
JUMLAH		33.621.169	160.840.211	2.574.416	-	-	197.035.796		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

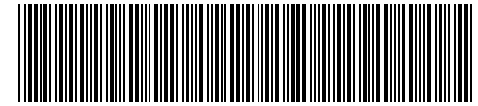
ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

Kementrian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8580-4820-1238-8669

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

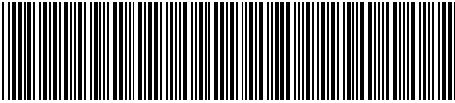
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	213.026	1.167.833	2.567.607	3.097.480	3.329.225	2.140.263	4.545.078	25.276.958	6.769.757	5.577.481	5.037.059	15.054.435	74.776.202

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
IV A. B L O K I R



DS:8580-4820-1238-8669

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

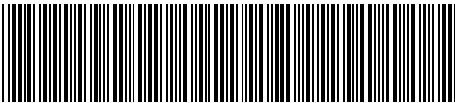
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
IV B. C A T A T A N



DS:8580-4820-1238-8669

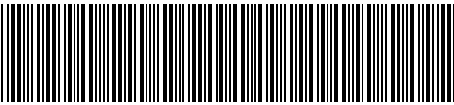
Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2023**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Revisi ke 07
Tanggal : 09 November 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 197.035.796.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR TIGA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 158.919.391.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 38.116.405.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 38.116.405.000 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 158.919.391.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 38.116.405.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

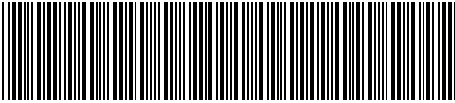
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023

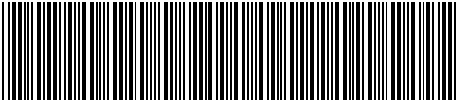


DS:4860-5079-6949-6502

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	167.803.763.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	167.803.763.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.232.033.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.232.033.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023

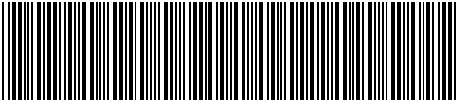


DS:4860-5079-6949-6502

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.232.033.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.232.033.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	167.803.763.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	73.396.881.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	20.081.976.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	74.324.906.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



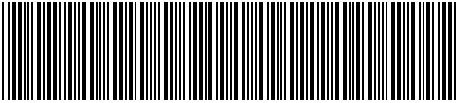
DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				29.232.033.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				29.232.033.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.822.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	7.822.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.190.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	3.00	NSPK	2.190.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.720.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.720.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	3.000.033.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (PN)	1.00	kegiatan	3.000.033.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	9.500.000.000
Rincian Output	:	01	QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
		02	QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)	1.00	layanan	5.000.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				167.803.763.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA

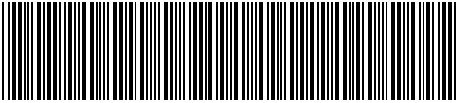


DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			73.396.881.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	66.871.835.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	715.826.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	728.757.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	2.004.873.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	800.000.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	925.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	366.370.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	61.331.009.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	2.842.198.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.00	Unit	832.594.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	2.009.604.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.015.000.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang	1.015.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	9,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.667.848.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.00	Dokumen	1.457.848.000
		02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	710.000.000
		03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2.00	Dokumen	500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



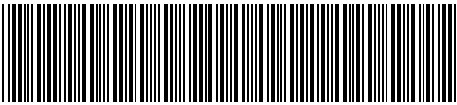
DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Kegiatan	:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan				20.081.976.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	16.111.976.000
Rincian Output	:	01	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		10.00	Rekomendasi Kebijakan	14.861.976.000
		02	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.000.000.000
Rincian Output	:	01	EBA.963	Layanan Data dan Informasi		4.00	Layanan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.970.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3.00	Dokumen	720.000.000
		02	EBD.965	Layanan Audit Internal		3.00	Dokumen	1.250.000.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				74.324.906.000	
	:							
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		25,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	52.795.304.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.650.000.000
		02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000.000
		03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.640.000.000
		04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
		05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		1.00	Rekomendasi Kebijakan	570.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA

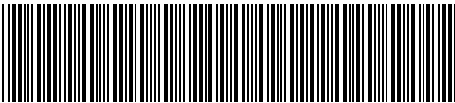


DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
	06	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	5,00	Rekomendasi Kebijakan	32.537.947.000
	07	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.680.000.000
	08	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.527.500.000
	09	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5,00	Rekomendasi Kebijakan	3.222.500.000
	10	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	11	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.467.357.000
	12	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE Kemitraan	13,00	Kesepakatan	13.359.643.000
Rincian Output	:	01	AEE.001 Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	5,00	Kesepakatan	2.199.643.000
		02	AEE.002 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2,00	Kesepakatan	3.250.000.000
		03	AEE.003 Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2,00	Kesepakatan	2.910.000.000
		04	AEE.004 Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4,00	Kesepakatan	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	4.179.799.000
Rincian Output	:	01	AFA.002 NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	NSPK	1.479.799.000
		02	AFA.003 NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	NSPK	2.200.000.000
		03	AFA.004 NSPK Pembiayaan Perumahan	1,00	NSPK	500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4860-5079-6949-6502

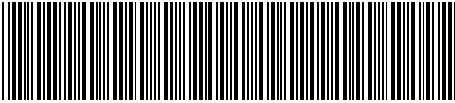
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	17,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.990.160.000	
Rincian Output		:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.00	Dokumen	3.990.160.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



DS:4860-5079-6949-6502

I B. SUMBER DANA

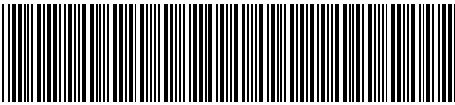
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	197.035.796.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	2.610.713	Rp.	38.116.405.000
1. Rupiah Murni	Rp.	158.919.391.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	38.116.405.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIANDVELOPMENTB 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	2.575,43 38.116.405,00	2	38.116.405			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



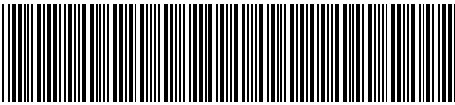
DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	32.701.169	161.492.429	2.842.198	-	-	197.035.796	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	29.232.033	-	-	-	29.232.033		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	29.232.033	-	-	-	29.232.033		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.822.000	-	-	-	7.822.000		
01	RM	-	7.822.000	-	-	-	7.822.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.190.000	-	-	-	2.190.000		
01	RM	-	2.190.000	-	-	-	2.190.000		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000		
01	RM	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.000.033	-	-	-	3.000.033		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



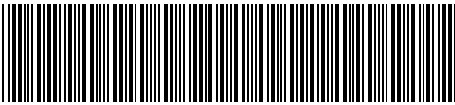
DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM 4976.QAH	RM	-	3.000.033	-	-	-	3.000.033	139	
	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	01 . 54	
01 RM 033.16.WA	RM	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	139	
	Program Dukungan Manajemen	32.701.169	132.260.396	2.842.198	-	-	167.803.763		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	32.701.169	37.853.514	2.842.198	-	-	73.396.881		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	32.701.169	34.170.666	-	-	-	66.871.835	01 . 54	
01 RM 4194.EBB	RM	32.701.169	34.170.666	-	-	-	66.871.835	139	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.842.198	-	-	2.842.198	01 . 54	
01 RM	RM	-	-	2.842.198	-	-	2.842.198	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN

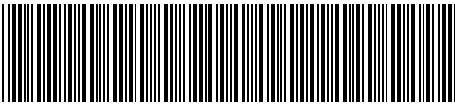


DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.015.000	-	-	-	1.015.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	1.015.000	-	-	-	1.015.000	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.667.848	-	-	-	2.667.848	01 . 54	
01 RM		-	2.667.848	-	-	-	2.667.848	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	20.081.976	-	-	-	20.081.976		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	16.111.976	-	-	-	16.111.976	01 . 54	
01 RM		-	6.894.773	-	-	-	6.894.773	139	
02 PLN		-	9.217.203	-	-	-	9.217.203	140	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



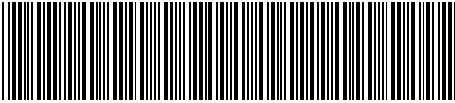
DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.970.000	-	-	-	1.970.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	1.970.000	-	-	-	1.970.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	74.324.906	-	-	-	74.324.906		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	52.795.304	-	-	-	52.795.304	01 . 54	
01 RM		-	23.896.102	-	-	-	23.896.102	139	
02 PLN		-	28.899.202	-	-	-	28.899.202	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	13.359.643	-	-	-	13.359.643	01 . 54	
01 RM		-	13.359.643	-	-	-	13.359.643	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.179.799	-	-	-	4.179.799	01 . 54	
01 RM		-	4.179.799	-	-	-	4.179.799	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.990.160	-	-	-	3.990.160	01 . 54	
	01 RM	-	3.990.160	-	-	-	3.990.160	139	
JUMLAH		32.701.169	161.492.429	2.842.198	-	-	197.035.796		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DS:4860-5079-6949-6502

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

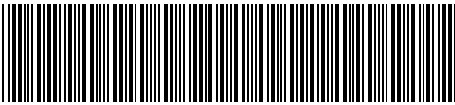
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	350.186	1.540.734	2.480.447	3.136.149	3.383.623	2.426.045	3.106.675	24.767.591	2.539.034	5.770.414	7.094.357	17.729.651	74.324.906

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
IV A. B L O K I R



DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

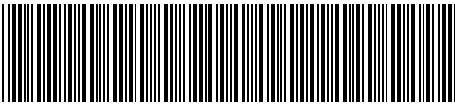
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
IV B. C A T A T A N



DS:4860-5079-6949-6502

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

LAMPIRAN 7
Berita Acara Kesepakatan Kinerja



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 02 / BA / DP / 2024

Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Hotel 101 Darmawangsa Jakarta telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023 yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP: Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	235,57	235,57
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100,00	116,75	116,75
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	100,00	98,95	98,95
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	87,81	99,37	113,16

2. Capaian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI TA. 2023

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	16,13	107,53
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	100,00
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	100,00
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	15,00	150,00
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	18,75	125,00
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00	100,00

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100,00	109,86	109,86

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25,00	22,91	91,64

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25,00	25,00	100,00

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25,00	24,80	99,20

f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

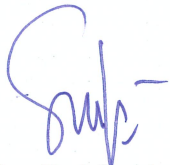
NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25,00	24,56	98,24
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	106,07	106,07

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Januari 2024

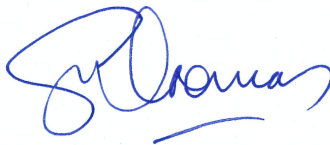
Yang Menyepakati,

Sekretaris Direktorat Jenderal



Sudiro Roi Santoso

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



Agus Sulaeman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Arvi Argyantoro

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan



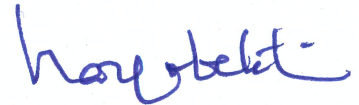
Reni Ahiantini

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Meike Kencanawulan Martawidjaja

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Haryo Bakti Martoyoedo

Mengetahui,
Direktur Jenderal



Herry Trisaputra Zuna

Lampiran Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI TA. 2023

Nomor :

Tanggal : 18 Januari 2024

A. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2023

Status: 31 Desember 2023

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	25.180.000.000.000	220.000	26.320.045.507.031	229.000
2	Subsidi Selisih Bunga (SSB)*	3.457.520.000.000	754.004	3.457.520.000.000	750.497
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	895.000.000.000	220.000	895.000.000.000	220.000
4	SMF	-	10.000	6.493.872.078.412	333.988
5	TAPERA	1.050.000.000.000	12.072	1.042.845.955.685	7.249
TOTAL		30.582.520.000.000	242.072	38.209.283.541.128	570.237

Keterangan:

Target unit berdasarkan Renstra DJPI TA. 2020-2024 dan penyesuaian target Tapera sesuai Pengesahan atas RKAT BP Tapera Tahun 2023

*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 754.004 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

**) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

B. Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Hasil Survei (%)	Target (%)	Capaian (%)
	96,42	30,00	28,93

C. Capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Hasil Survei (%)	Target (%)	Capaian (%)
	96,50	30,00	28,95

D. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU Siap Dikerjasamakan TA. 2023

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI			
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	
1	Sumber Daya Air	5	5.141.240.929.000	2	PLTM Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan	134.219.000.000	359.599.000.000
					PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	225.380.000.000	
2	Jalan dan Jembatan	2	66.432.251.000.000	5	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis	37.147.000.000.000	135.750.000.000.000
					Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan-Gresik	23.332.000.000.000	
					Jalan Tol Demak Tuban	49.607.000.000.000	
					Jalan Tol Gilimanuk Mengwi	22.840.000.000.000	
					Fly Over Sitinjau Lauik	2.824.000.000.000	
3	Permukiman	2	10.620.000.000.000	4	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang (BtoB)	1.940.000.000.000	27.179.725.000.000
					SPAM Batam-Bintan	14.438.858.000.000	
					SPAM Regional Ir. H.Djuanda/ Jatiluhur II	9.740.000.000.000	
					SPAM Regional Sinumbra	1.060.867.000.000	
4	Perumahan	4	61.230.000.000.000	2	Rusun Hankam WP 1A (60 tower)	14.990.000.000.000	16.660.000.000.000
					Rusun North Government WP 1A (6 tower)	1.670.000.000.000	
TOTAL		13	143.423.491.929.000	13	179.949.324.000.000		
Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)				70,00%			
Capaian Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)				87,83%			

Keterangan:

- Target berdasarkan DIPA DJPI TA. 2023
- Realisasi Proyek Siap Dikerjasamakan minimal menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS)

E. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEUANGAN (%)		FISIK (%)		
					RN	RL	RN	RL	KINERJA
I	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.204.033	78.534.648	100,00	92,17	100,00	92,42	92,42
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	85.204.033	78.534.648	100,00	92,17	100,00	92,42	92,42
II	WA	Program Dukungan Manajemen	157.988.004	155.816.386	100,00	98,63	100,00	98,86	98,86
1	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	73.396.881	72.536.007	100,00	98,83	100,00	99,10	99,10
2	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	19.398.894	19.191.105	100,00	98,93	100,00	99,79	99,79
3	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	65.192.229	64.089.275	100,00	98,31	100,00	98,32	98,32
TOTAL			243.192.037	234.351.034	100,00	96,36	100,00	96,60	96,60

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/>, status: 10 Januari 2024



BERITA ACARA KESEPAKATAN
NOMOR: I /BA/Ps/2024

**CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TA 2023**

Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah disepakati Berita Acara Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023 dengan hasil sebagai berikut:

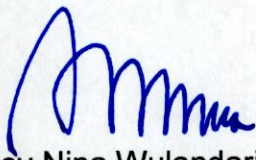
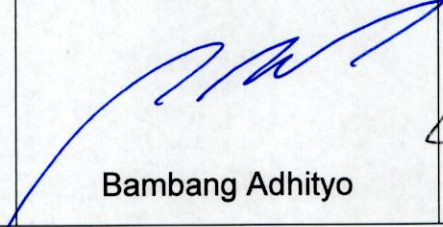
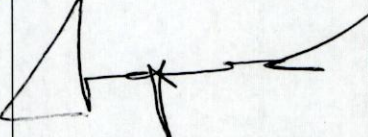
1. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja	Target Renstra 2023 (%)	Target PK 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	79,26	87,81	99,37
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	16,13
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	15,00
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	18,75
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	10,00	10,00	10,00

2. Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2023

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keu (%)		Fisik (%)	
				RN	RL	RN	RL
1	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	68.327.041	67.500.644	100,00	98,79	100,00	100,00
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	61.801.995	61.108.217	100,00	98,88	100,00	100,00
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.842.198	2.801.089	100,00	98,55	100,00	100,00
4	Layanan Manajemen SDM Internal	1.015.000	984.480	100,00	96,99	100,00	100,00
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.667.848	2.606.857	100,00	97,71	100,00	100,00

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Januari 2024		
Yang Menyepakati,		
Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
 Desy Nina Wulandari	 Bambang Adhityo	 Anggoro Widyastika
Mengetahui,		
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
 Sudiro Roi Santoso		



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan